



**PEMERINTAH KABUPATEN
NIAS SELATAN**

**RENCANA
KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**

bkkbn 

DINAS P2KBP3A

KABUPATEN NIAS SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Fahuwusa Laia, Komplek Baloho Indah, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan
Pos-el p2kbp3anisel@gmail.com, Kode Pos 22865

Teluk Dalam, 29 Juli 2024

Nomor : 000.7.5/1538 /DP2KBP3A/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Penyampaian Rencana Kerja (Renja)
OPD Dinas P2KBP3A TA. 2025

Yth. Bapak Bupati Nias Selatan
Cq. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Rencana Kerja (Renja) TA. 2025 OPD Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS P2KBP3A
KABUPATEN NIAS SELATAN,

SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep.,Ns., M.K.M
PEMBINA Tk. I
NIP. 19810810 200112 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa selalu kami panjatkan, karena hanya dengan rahmat dan karuniaNya serta Ridhonya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Rancangan Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dapat kami selesaikan sebagaimana semestinya.

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

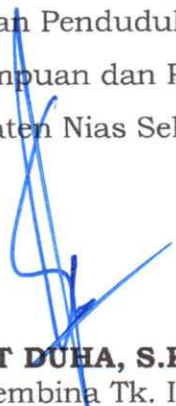
Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. Penetapan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 7 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Rancangan Renja) Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Oleh karena itu, segala usul dan saran yang bermanfaat dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak demi kemajuan Kabupaten Nias Selatan pada umumnya dan yang kita cintai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dina Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Teluk Dalam, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan,



SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M

Pembina Tk. I

NIP. 19810810 200112 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dengan Perangkat Daerah	49
2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	63
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	78
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	95
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	95
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	114
3.3 Program dan Kegiatan	115
BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
PERANGKAT DAERAH	137
BAB V PENUTUP	138
LAMPIRAN	140

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d (tahun berjalan) Kabupaten Nias Selatan	11
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kerja	34
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kerja	35
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan	36
Tabel 2.3	Data Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB dan Alat Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023	46
Tabel 2.4	Data Alat Angkutan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023	47
Tabel 2.5	Data Alat Kantor dan Rumah Tangga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023	48
Tabel 2.6	Data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023	48
Tabel 2.7	Data Komputer dan Perlengkapannya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023	49
Tabel T-C.31	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	64
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Nias Selatan	79
Tabel 3.1	Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	98
Tabel 3.2	Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	106
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Nias Selatan	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan	44
Gambar 3.1	Skema Perumusan Tujuan Kementerian PPPA	97

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Data Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024	45
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis Renstra Perangkat Daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah secara umum mempunyai nilai penting, antara lain digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN guna mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian Pembangunan Nasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025.

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (KUA PPAS) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan;
17. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 32 Tahun 2022 Selatan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024;
19. Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 5.1_48 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Penyusun RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 antara lain:

1. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025;
2. Menciptakan keterpaduan program pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
3. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, antara lain:

1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
2. Meningkatkan pelayanan utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, khususnya di bidang perencanaan pembangunan secara makro dan pencapaian target Visi Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026;
3. Sebagai dasar pengukuran kinerja dan evaluasi program/kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 ini terdiri dari beberapa bagian yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Memuat tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dengan Dokumen RKPD dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat apa yang menjadi landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II PENDAHULUAN

Menggambarkan kajian (reviu) terhadap hasil Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun Lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada sub bab ini memuat kajian (Reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan tahun lalu (tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan serta kaitannya terhadap target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan tahun-tahun sebelumnya yang dilengkapi dengan Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dan Pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada sub bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, maupun terhadap IKK yang dilengkapi dengan Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada sub bab ini memuat terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada sub bab ini berisikan uraian mengenai perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan, proses Rancangan Awal RKPD, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD yang dilengkapi dengan Tabel T-C.31 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada sub bab ini berisikan uraian mengenai proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, kesesuaian usulan dan kaitannya terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan yang

dilengkapi dengan Tabel T-C.32 Usulan dan Program Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta program dan kegiatan, yang terdiri dari beberapa Sub bab antara lain:

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada sub bab ini diuraikan mengenai penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini diuraikan mengenai perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

3.3 Program dan Kegiatan

Pada sub bab ini berisikan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, yang dilengkapi dengan Tabel T-C.33 Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sumber pendanaannya, yang dilengkapi dengan Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2024.

Evaluasi terhadap capaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.29 berikut.

TABEL T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Nias Selatan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100% Persen Persen		100% Dok	100% Dok	61%	100% Dok	Dok	
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	49 Dok unit Dok		10 Dok	9 Dok	90%	10 Dok	Dok	
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	5 Laporan		1 Dok	1 Laporan	100%	1 Dok	2 Dok	40%
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	5 Laporan		1 Dok	1 Laporan	100%	1 Dok	3 Dok	60%
2 14 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	5 Unit		1 Dok	1 Unit	100%	1 Dok	3 Dok	60%
2 14 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	5 Laporan		1 Dok	1 Laporan	100%	1 Dok	3 Dok	60%
2 14 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	5 Laporan		1 Lap	1 Laporan	100%	1 Lap	2 Lap	40%
2 14 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah yang	24 Dok		5 Lap	4 Dok	80%	5 Lap	10 Lap	42%
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	360 Dok		72 Dok	72 Dok	100%	72 Dok	Dok	
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	330 Organisasi		66 Bulan	66 Organisasi	100%	66 Orang/Bulan	66 Orang/Bulan	20%
2 14 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	5		1 Lap	1 Lap	100%	1 Lap	2 Lap	40%
2 14 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	20 Kampung KB		4 Lap	4 Kampung KB	100%	4 Lap	10 Lap	50%
2 14 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	5 Balai Penyuluhan KB		1 Dok	1 Balai Penyuluhan KB	100%	1 Dok	2 Dok	40%
2 14 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	5 Kec Kegiatan Paket		2 Dok	1 Dok	50%	1 Dok	Dok	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	14	01	2.03	03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5 Kecamatan		1 Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	0%
2	14	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Unit		1 Lap	1 Unit	100%	1 Dok	Dok	0%
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	45 Kegiatan		45 Org	- Org	0%	45 Org	Org	
2	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	220 Orang		45 Stell	- Orang	0%	45 Paket	Paket	0%
2	14	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	95 Organisasi		15 Org	- Organisasi	0%	35 Org	Org	0%
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 Laporan		100 %	100 %	71%	100 %	%	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Kegiatan Faskews Faskes Org		1 Paket	1 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	55%
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327 Faskes		150 Paket	110 Paket	73%	17 Paket	269 Paket	82%
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	460 PLKB/PKB		150 Paket	105 Paket	70%	150 Paket	293 Paket	64%
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	123 Orang		60 Paket	60 Paket	100%	1 Paket	120 Paket	98%
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	123 Laporan		60 Bulan	55 Laporan	92%	1 Paket	116 Paket	94%
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.450 Dokumen		500 Kali	300 Dokumen	60%	150 Kali	876 Kali	60%
2	14	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	25 Unit		12 Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	0%
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	14 Orang		14 Unit	14 Unit	25%	14 Unit	Unit	
2	14	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Laporan		unit	unit		unit	unit	0%
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	48 Orang		14 Unit	- Unit	0%	Unit	4 Unit	8%
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 Laporan		4 Unit	- Unit	0%	10 Unit	Unit	0%
2	14	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Org		4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	Unit	0%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 Kab/kota		4 Unit	- Unit	0%	1 Unit	3 Unit	10%
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	ada /tidak ada 1.750 Orang		470 Lap	409 Lap	87%	ada /tidak ada Ada	Ada	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.750 Orang		350 Lap	295 Lap	84%	350 Lap	870 Lap	50%
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Kampung KB		12 Lap	12 Lap	100%	12 Lap	Lap	0%
		01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Organisasi		12 Lap	6 Lap	50%	12 Lap	Lap	0%
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas untuk pelayanan umum kantor	216 Dokumen		96 Lap	96 Lap	100%	8 Lap	196 Lap	91%
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	40 Laporan		27 Unit	26 Unit	67%	40 Unit	Unit	
		01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		1 Unit	Unit	0%	1 Unit	Unit	0
		01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Kampung		25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	75 Unit	60%
		01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	49 Unit		Unit	Unit		25 Unit	12 Unit	24%
		01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Dirhabilitasi	51 Kampung		Unit	Unit		1 Unit	Unit	0%
		01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53 Persen Persen Persen		1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	30 Unit	57%
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		K. KB Paket Desa Dok			K. KB Paket Desa Dok				
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Kampung KB			Kampung KB				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	2 Unit 2 71.70 80.00 85.00		2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	17%	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	Dokumen Kegiatan Persen Persen Persen	
2 08 02 2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2 Desa 2 2		2 Kegiatan 2 Dok 2 Dok	2 Desa 2 2	0%	2 Kegiatan 2 Dok 2 Dok	Kegiatan Dok Dok	
2 08 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	8 Laporan		2 Dok	Laporan		2 Dok	Dok	0%
2 08 02 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	56 Keluarga		Dokumen	Keluarga				0%
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	42 Kegiatan		14	Kegiatan	0%	14 PD	14 PD	33%
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28		14 PD	14 PD	100%		14 PD	50%
2 08 02 2.01 05	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	2 Kebijakan		Kebijakan	Kebijakan				0%
2 08 02 2.01 06	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	50 orang		orang	orang				0%
2 08 02 2.01 07	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	2 Unit		Laporan	Unit				0%
2 08 02 2.01 08	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	60 Orang		Orang	Orang				0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 02 2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi.	Orang		2 Dok	Dok	50%	2 Dok	Dok	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	#REF! Laporan			Laporan				0%
2 08 02 2.02 0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	40%
2 08 02 2.02 0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Organisasi		1 Organisasi	Organisasi				0%
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Dok	2 Laporan	0%	2 Dok	Dok	
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	10 Lembaga		Lembaga	Lembaga				0%
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang		1 Orang	Orang				0%
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	10 Dok		1 Dok	Dok	0%	2 Dok	1 Dok	10%
2 08 02 2.03 04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	10 Lembaga		Lembaga	Lembaga				0%
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	1.67		1.67 Kasus per 100.000	Kasus per 100.000	0%	1.67 Kasus per 100.000	Kasus per 100.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Organisasi 2		2 Dok	Dok	0%	3 Dok	Dok	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Laporan		1 Dok	Laporan	0%	2 Dok	Dok	0%
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	52 Organisasi		PD	Organisasi	0%	14 PD	PD	0%
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan 10		10 Layanan	Layanan	100%	10 Orang 10 Orang	Orang Orang	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	40 Org		10 Org	10 Org	100%	10 Org	10 Org	25%
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Layanan		10 Layanan	Layanan	0%	10 Layanan	Layanan	0%
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 1 10		2 Laporan 1 Dok 10 Orang	Laporan Dok Orang	0%	2 Laporan 1 Dok 10 Orang	Laporan Dok Orang	
2 08 03 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Laporan		Laporan	Laporan	0%	2 Lap	Lap	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang		Orang	Orang	0%			0%
2 08 03 2.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	50 Org		Org	Org	0%	10 Org	Org	0%
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dok		Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	0%
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Keluarga	57.00		57.00 Poin	Poin	0%	57.00 Poin	Poin	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14 1 1		2 Lap	2 Lap	100%	14 PD 1 Dok 1 Laporan	PD Dok Laporan	
2 08 04 201 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	52 PD		14 PD	14 PD	100%	14 PD	14 PD	27%
2 08 04 201 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	59 Dok		1 Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	0%
2 08 04 201 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	59 Dok		Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	0%
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1		Lembaga	Lembaga	0%	1 Lembaga	Lembaga	
2 08 04 2.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	21 Lembaga		Lembaga	Lembaga	0%	1 Lembaga	Lembaga	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 04 202 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		Orang	Orang	0%			0%
2 08 04 203	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5		Kali	5 Kali	0%	5 Kali	Kali	
2 08 04 203 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	25 Layanan		Layanan	5 Layanan	0%	5 Layanan	Layanan	0%
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	100		100 Persen	Persen	0%	100 Persen	Persen	
2 08 05 201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 1		1 Dokumen 1 Dokumen	Dokumen Dokumen	0%	1 Dokumen 1 Dokumen	Dokumen Dokumen	
2 08 05 201 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Dok		1 Dok	1 Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
2 08 05 201 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dok		Dok	Dok	0%	1 Dok	1 Dok	20%
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kampung layak anak	100		100 Persen	Persen	0%	100 Persen	Persen	
2 08 06 201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 1		10 Orang 1 Dokumen	Orang Dokumen	0%	10 Orang 1 Dokumen	Orang Dokumen	
2 08 06 201 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 Organisasi		1 Organisasi	Organisasi	0%	10 Organisasi	22 Organisasi	49%
2 08 06 201 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dok		Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 08 06 202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 1 5		1 Dokumen 1 Dokumen 5 Orang	Dokumen Dokumen Orang	0%	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Orang	Dokumen Dokumen Orang	
2 08 06 202 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Org		Org	Org	0%	5 Org	Org	0%
2 08 06 202 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dok		Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	0%
2 08 06 202 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dok		Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	0%
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	22.00 86.00		22.00 Persen 86.00 Persen	22.00 Persen 86.00 Persen	33%	87.00 Persen 20.00 Persen	Persen Persen	
2 14 02 2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 1 1 1 1 1 1		1 Dok 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dok 1 Dok 1 Kegiatan	1 Dok 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dok 1 Dok 1 Kegiatan	33%	1 Dok 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dok 1 Dok 1 Kegiatan	Dok Kegiatan Kegiatan Dok Dok Kegiatan	
2 14 02 2.01 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	Dok	0%
2 14 02 2.01 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dok		Dok	Dok	0%			0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 14 02 2.01 03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	2 Dok		1 Dok	Dok	0%			0%
2 14 02 2.01 04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	3 Dok		1 Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	0%
2 14 02 2.01 07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	2 Dok		Dok	Dok	0%			0%
2 14 02 2.01 13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50 Kegiatan		10 Kegiatan	Kegiatan	0%	10 Organisasi	Organisasi	0%
2 14 02 2.01 14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	3 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Laporan	Laporan	0%
2 14 02 2.01 15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			0%
2 14 02 2.01 23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Kegiatan		Kegiatan	Kegiatan	0%	1 Kegiatan	Kegiatan	0%
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 1		1 Dok 1 Dok	1 Dok 1 Dok	33%	1 Dok 1 Dok	Dok Dok	
2 14 02 2.02 02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	Dok	0%
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	#REF! Dok		1 Dok	1 Dok	100%			0%
2 14 02 2.02 05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	2 Dok		Dok	Dok	0%			0%
2 14 02 2.02 06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	2 Dok		Dok	Dok	0%			0%
2 14 02 2.02 07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System /Peringatan Dini)	2		1 Dok	1 Dok	100%			0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
214022.0208	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	10 Unit		5 Unit	5 Unit	100%			0%
214022.0209	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 Laporan		Laporan	Laporan	0%			0%
214022.0210	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	2 Dok		Dok	Dok	0%			0%
214022.0211	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	4 Dok		1 Dok	1 Dok	100%			0%
214022.0212	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan		Laporan	Laporan	0%			0%
214022.0213	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	73 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	2 Dok	3%
214022.0215	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	55 Unit		Unit	Unit	0%	5 Unit	Unit	0%
214022.0216	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	2 Laporan		Laporan	Laporan	0%			0%
214022.0217	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	2 Dok		Dok	Dok	0%			0%
214022.0218	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	2 Laporan		Laporan	Laporan	0%			0%
214022.0219	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2 Dok		Dok	Dok	0%			0%
214022.0220	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	3 Dok		Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	0%
214022.0213	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	#REF! Dok		Dok	Dok	0%			0%
21403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kampung KB Aktif Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	100 100.00		100 Persen 100.00 Persen	100 Persen 100.00 Persen		100 Persen 100.0 Persen 0	Persen Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 23 1		1 Dok 23 unit 1 Dok	1 Dok 23 unit 1 Dok	82%	1 Dok 23 unit 1 Dok	Dok unit Dok	
2 14 03 201 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dok		1 Dok	1 Dok	100%			0%
2 14 03 201 05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK yang Tersedia	6		3 Media	Media	0%			0%
2 14 03 201 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	2 Kampung KB		1 Kampung KB	1 Kampung KB	100%			0%
2 14 03 201 07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	2 Balai Penyuluhan KB		1 Balai Penyuluhan KB	1 Balai Penyuluhan KB	100%			0%
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	39 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	35 Laporan	19 Laporan	49%
2 14 03 2.01 09	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	125 Unit		23 Unit	23 Unit	100%	23 Unit	57 Unit	46%
2 14 03 2.01 10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	135 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	100%	23 Laporan	77 Laporan	57%
2 14 03 201 11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	82 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	78 Laporan	Laporan	41%
2 14 03 201 12	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dok		1 Dok	Dok	0%	1 Dok	Dok	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2140320113	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	5 Dok		1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	60%
2140320114	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	100%			0%
214032.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMPdan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	35 1 35		35 Kec 1 Kegiatan 35 Paket	35 Kec 1 Kegiatan 35 Paket	45%	35 Kec 1 Kegiatan 35 Paket	Kec Kegiatan Paket	
214032.0201	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	20 Kecamatan		10 Kecamatan	10 Kecamatan	100%			0%
214032.0202	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	140 Unit		35 Unit	24 Unit	69%	35 Unit	35 Paket	25%
214032.0203	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			0%
214032.0204	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	904 Orang		Orang	Orang	0%			0%
214032.0205	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	93 Organisasi		Organisasi	Organisasi	0%	35 Organisasi	Organisasi	0%
2140320206	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Laporan		Laporan	Laporan	0%	1 Laporan	Laporan	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
214032.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 41 47 10 15 5 5 41		4 Kegiatan 41 Faskews 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	4 Kegiatan 41 Faskews 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	47%	4 Kegiatan 41 Faskews 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	Kegiatan Faskews Faskes Org PLKB/PKB PLKB/PKB Unit faskes	
214032.0301	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	143 Faskes		1 Faskes	1 Faskes	100%	47 Laporan	47 Laporan	33%
214032.0302	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	30 PLKB/PKB		15 PLKB/PKB	15 PLKB/PKB	100%			0%
214032.0303	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	800 Orang		150 Orang	150 Orang	100%			0%
214032.0304	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2 Laporan		Laporan	Laporan	0%			0%
214032.0305	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	51 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	47 Dokumen	25 Dokume	49%
214032.0306	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	26 Unit		5 Unit	5 Unit	0%	6 Unit	12 Unit	46%
214032.0307	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	400 Orang		Orang	Orang	0%			0%
214032.0308	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	131 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	41 Laporan	23 Laporan	18%
214032.0310	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	45 Orang		5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	18 Orang	40%
214032.0311	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	10 Laporan	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 14 03 2.03 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50 Org		10 Org	5 Org	50%	10 Org	18 Org	36%
2 14 03 2.03 14	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	2 Kab/kota		Kab/kota	Kab/kota	0%			0%
2 14 03 2.03 15	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	45 Orang		Orang	Orang	0%	15 Orang	7 Orang	16%
2 14 03 2.03 16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	400 Orang		Orang	Orang	0%			0%
2 14 03 204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	78		78 Kampung KB	78 Kampung KB	83%	78 Kampung KB	Kampung KB	
2 14 03 204 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	10 Organisasi		Organisasi	Organisasi	0%			0%
2 14 03 204 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	352 Dokumen		78 Dokumen	78 Dokumen	100%	78 Dokumen	212 Dokumen	60%
2 14 03 204 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Kampung KB).	274 Dokumen		78 Dokumen	78 Dokumen	100%		156 Dokumen	57%
2 14 03 204 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	10		4 Laporan	4 Laporan	100%			0%
2 14 03 204 05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	274 Unit		59 Unit	59 Unit	100%			0%
2 14 03 204 06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	236		59 Kampung	59 Kampung	100%			0%
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif	70.00 60.00 70.00		50.00 Persen 40.00 Persen 50.00 Persen	50.00 Persen 40.00 Persen 50.00 Persen		50.00 Persen 40.00 Persen 50.00 Persen	Persen Persen Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
21404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	78 20 461 1		78 K. KB 20 Paket 461 Desa 1 Dok	78 K. KB 20 Paket 461 Desa 1 Dok		78 K. KB 20 Paket 461 Desa 1 Dok	K. KB Paket Desa Dok	
2140420101	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	#REF! Kampung KB		Kampung KB	Kampung KB				0%
2140420102	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	#REF! Unit		Unit	Unit				0%
2140420105	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2 Dok		1 Dok	1 Dok				0%
2140420108	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2 Laporan		Laporan	Laporan				0%
2140420114	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	400 Keluarga		Keluarga	Keluarga				0%
2140420115	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	2 Kegiatan		Kegiatan	Kegiatan				0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2140420116	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 Lap/Dok		Lap/Dok	Lap/Dok				0%
2140420117	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan		Laporan	Laporan				0%
2140420118	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	165 Unit		20 Unit	20 Unit		25 Unit	53 Unit	32%
2140420119	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	200 Orang		Orang	Orang				0%
2140420120	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	200 Orang		Orang	Orang				0%
2140420121	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan		Laporan	Laporan				0%
2140420122	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	200 Orang		Orang	Orang				0%
2140420124	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.583 Orang		461 Orang	461 Orang		461 Orang	1283 Orang	81%
214042.0125	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2 Laporan		Laporan	Laporan				0%
214042.0126	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	200 Kelompok		Kelompok	Kelompok				0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 14 04 201 27	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2 Dok		Dok	Dok				0%
2 14 04 201 28	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	352 Kelompok		78 Kelompok	78 Kelompok		78 Kampung KB	156 Kampung KB	44%
2 14 04 2.01	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1		1 Dok	1 Dok		1 Dok	Dok	
2 14 04 2.02	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja								0%
2 14 04 2.02 01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Organisasi		Organisasi	Organisasi				0%
2 14 04 202 02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan		Laporan	Laporan				0%
2 14 04 202 03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Organisasi		Organisasi	Organisasi				0%
2 14 04 202 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	40%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra P2KBP3A Tahun 2021 s.d 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2 14 04 202 05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2 Laporan		Laporan	Laporan				0%
2 14 04 202 06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	2 Laporan		Laporan	Laporan				0%

KEPALA DINAS P2KBP3A
KABUPATEN NIAS SELATAN

SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina Tk. I
NIP.19810810 200112 2 001

Dari Tabel T-C.29 di atas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
 - 1) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan target 1 (satu) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
 - 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 70 (tujuh puluh) orang sedangkan capaian 0 (nol).
 - 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 29 (dua puluh Sembilan) unit sedangkan capaian 0 (nol) unit.
 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, antara lain:
 - 1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) dokumen sedangkan capai 0 (nol) dokumen.
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 2 (dua) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
 - 3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

dengan target 2 (dua) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.

3. Program Perlindungan Perempuan, antara lain:

- 1) Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target 3 (tiga) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
- 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 5 (lima) layanan sedangkan capaian 0 (nol) layanan.
- 3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 4 (empat) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, antara lain:

- 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 3 (tiga) laporan sedangkan capaian 0 (nol) laporan.
- 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 (satu) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
- 3) Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target 5 (lima) layanan sedangkan capaian 0 (nol) layanan.

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, antara lain:

- 1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 4 (empat) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), antara lain:

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 2 (dua) dokumen dengan capaian 0 (nol) dokumen.
 - 2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota target 4 (empat) dokumen dengan capaian 0 (nol) dokumen.
7. Program Pengendalian Penduduk, antara lain:
- 1) Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan target 6 (enam) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
 - 2) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 6 (enam) dokumen sedangkan capaian 0 (nol) dokumen.
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), antara lain:
- 1) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan target 1 (satu) laporan sedangkan capaian 0 (nol) laporan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai berikut:
- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target tercapai 100%.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target tercapai 100%.
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah target tercapai 23.38%.
 - 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target tercapai 94,89%.

- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target tercapai 58%.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), antara lain:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal target tercapai 89%.
 - 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) target tercapai 100%.
 - 3) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota target tercapai 100%.
 - 4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB target tercapai 100%.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), antara lain:
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga target tercapai 52.99%.

Secara umum persentase realisasi program/kegiatan yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 80,14% dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 98,07%.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana sebesar 97,26%.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar 52,99%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yakni keterbatasan anggaran dan beberapa program yang belum menjadi Program Prioritas sedangkan implementasi yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut yakni perlu adanya penambahan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai renstra OPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan. Kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan berdasarkan indikator kinerja antara lain:

1. Nilai Lakip.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.
3. Persentase KB Aktif.
4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*).
5. Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan.
6. *Total Fertility Rate* (TFR).

Berdasarkan penetapan indikator kinerja tersebut maka dilakukan pengukuran kinerja dengan menghitung Nilai Capaian Indikator Kinerja terhadap 6 indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 dilakukan pengukuran kinerja dan didapatkan nilai capaian indikator kinerja untuk setiap kegiatan, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian tersebut. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator Kinerja sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintah

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai Lakip	C	C	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	C	C	100%

Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tabel di atas, didapatkan Nilai Lakip dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target Predikat C sedangkan realisasinya Predikat C. Sehingga persentase rata-rata capaian indikator di atas sebesar 100%.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase KB Aktif	45%	40%	89%
2	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	45%	45,89%	101,98%
3	Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan	80%	50%	63%
4	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	3,5	3,18	90,86%

Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tabel di atas, Persentase KB Aktif dengan target 45%, realisasi 40% dan capaiannya 89%, Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) dengan target 45%, Realisasi 45,89% dan capaiannya 101,89%, Persentase Kelompok BKB, BKR, BKL (Tribina) di Kabupaten Nias Selatan dan dengan target 80%, realisasi 50% dan capaiannya 63%, *Total Fertility Rate* (TFR) dengan poin 3,5, realisasi 3,18 dan capaiannya 90,86%. Dengan demikian persentase rata-rata dari 4 capaian indikator di atas sebesar 86%.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023 dapat diuraikan pada Tabel T-C.30 berikut.

TABEL T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan DP2KBP3A Kabupaten Nias Selatan
Provinsi Sumatera Utara

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025 (thn n +1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis	-	□	100%	100%	100%	100%					
2	Nilai Lakip	-	□	C	C	B	B					
3	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		□	80%	85%	90%	90%					
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar			80%	85%	90%	90%					
4	Persentase Perda dan Perkada yang di Tegaskan	□	-	80%	85%	90%	90%					

KEPALA DINAS P2KBP3A
KABUPATEN NIAS
SELATAN

SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina Tk.
NIP. 19810810 200112 2 001

2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian Visi Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 "***Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera***".

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, maka tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian pengembangan penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi antara lain:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 2) Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi daerah dan kebijakan kepala daerah.
 - 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 4) Penetapan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan.

- 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 6) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana.
- 7) Pengkoordinasian dan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan Kabupaten Nias Selatan, termasuk dana, sarana dan prasarana.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan;
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris melaksanakan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 2) Penyusunan rencana program dan anggaran.
 - 3) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat.
 - 4) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.
- c. Sekretaris dibantu 3 (tiga) Subbagian, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.
 - 2) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

- 3) Subbagian Keuangan dan Sarana, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari:
 - a. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di Kabupaten Nias Selatan.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 3) Pelaksanaan NSPK di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 4) Pelaksanaan Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas Penduduk.
 - 5) Pelaksanaan Pemetaan perkiraan (Parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten Nias Selatan.
 - 6) Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 7) Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB).
 - 8) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - 9) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan

Penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

10) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

1) Seksi Advokasi dan Penggerakan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Advokasi dan Penggerakan.

2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Nias Selatan.

b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3) Pelaksanaan NSPK di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- 4) Pelaksanaan sistem informasi Gender dan Anak serta pengelolaan Website (e-gov).
 - 5) Pelaksanaan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan, penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data tentang informasi Gender dan Anak.
 - 6) Pemberian bimbingan Teknis dan fasilitasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - 7) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:
- 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang.
 - 2) Seksi Perlindungan Anak
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemenuhan hak anak terkait hak sipil, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan Budaya.
 - 3) Seksi Informasi Gender dan Anak
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Informasi gender dan Anak serta pengelolaan website (e-Gov).
5. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Selatan.

- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana.
 - 3) Pelaksanaan Penyelenggaraan norma, Standar prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana.
 - 4) Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat obat Kontrasepsi di Kabupaten Nias Selatan.
 - 5) Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten Nias Selatan.
 - 6) Pelaksanaan Pembinaan Kesertaan be KB di Kabupaten Nias Selatan.
 - 7) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di bidang Keluarga Berencana.
 - 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana.
 - 9) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Keluarga Berencana dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:
- 1) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian Alokasi di Kabupaten Nias Selatan.
 - 2) Seksi Jaminan Pelayanan KB
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Jaminan Pelayanan KB di Kabupaten Nias Selatan.
 - 3) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan

Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan dan Peningkatan kesertaan Ber KB.

6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari:

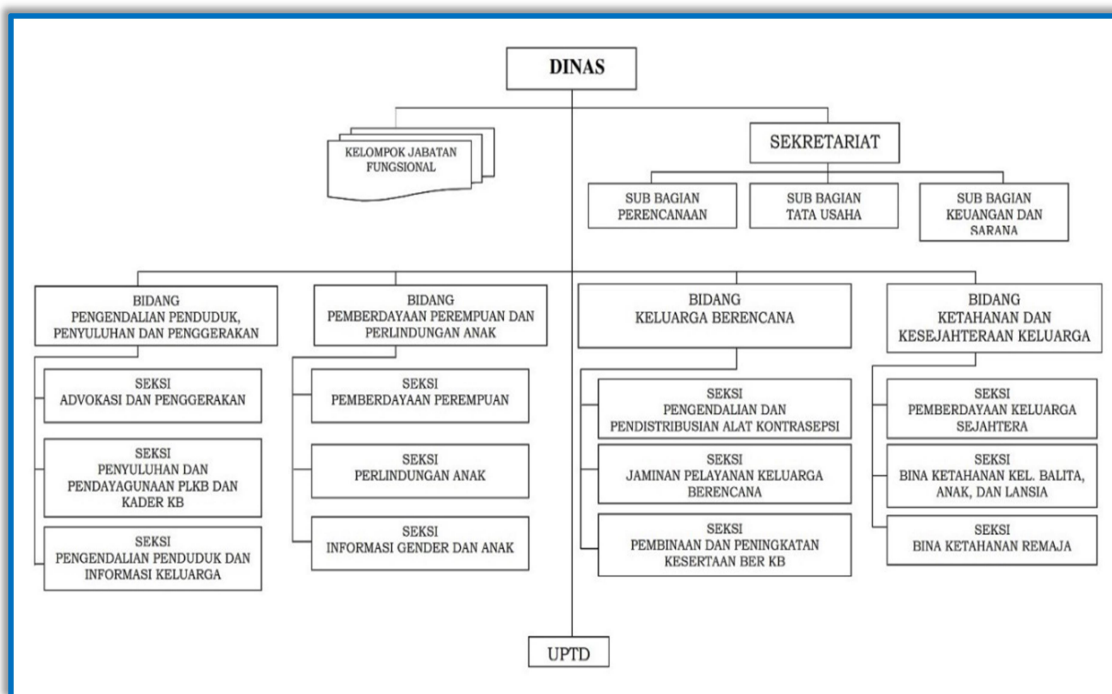
- a. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Nias Selatan.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis daerah di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Teknis di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 3) Pelaksanaan NSPK di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 4) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Pembinaan Ketahanan Remaja.
 - 5) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan.
 - 6) Pelaksanaan Kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui Usaha mikro Keluarga.
 - 7) Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 8) Pemberian Bimbingan Teknis dan Fasilitasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - 9) Pelaksanaan Koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
 - 2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

3) Seksi Bina Ketahanan Remaja

Mempunyai tugas Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, standar Prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi Pembinaan Ketahanan Remaja.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan



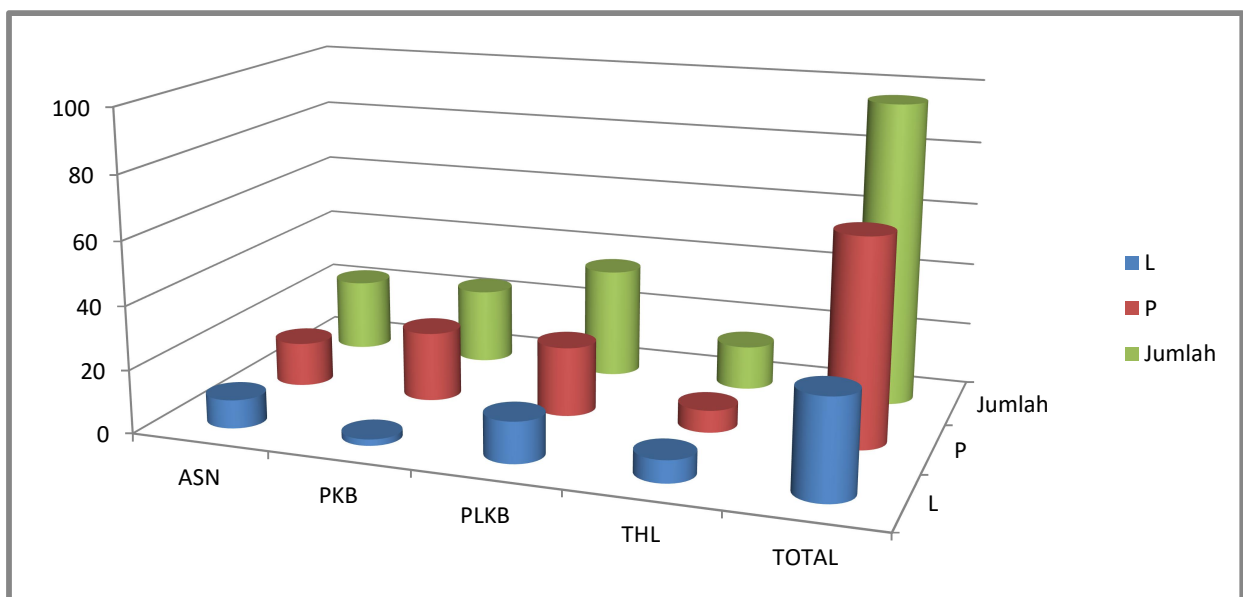
1.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah ke depan.

Untuk itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan akan berupaya secara terus menerus setiap tahunnya melakukan peningkatan dan penguatan sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana pendukung pelayanan aparatur, guna mencapai pencapaian tugas dan fungsi organisasi dalam membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak serta keluarga berencana. Tentunya hal tersebut dapat terlaksana dengan dukungan sumber daya aparatur dan dukungan kapasitas aset/modal pendukung.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh 80 orang, yang terdiri dari ASN berjumlah 35 orang, PKB berjumlah 5 orang, PLKB berjumlah 31 orang, THL berjumlah 9 orang.

Grafik 2.1
Data Ketenagaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024



1.1.3 Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Maka untuk menunjang kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, perlu adanya ketersediaan sarana dan prasarana.

Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

1. Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB dan Alat Kontrasepsi.
2. Alat Angkutan.
3. Alat Kantor dan Rumah Tangga.
4. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar.
5. Komputer dan Perlengkapannya.

Dari 6 (enam) sarana dan prasarana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan di atas dapat diuraikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 2.3
Data Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB dan Alat Kontrasepsi
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023

No	Nama Bangunan/Gedung	Jumlah	Kondisi Bangunan
1	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Fanayama	1	Kurang Baik
2	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Lahusa	1	Kurang Baik
3	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Gomo	1	Kurang Baik
4	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Mazino	1	Kurang Baik
5	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Maniamolo	1	Kurang Baik
6	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Somambawa	1	Kurang Baik
7	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Toma	1	Kurang Baik

8	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Luahagundre Maniamolo	1	Kurang Baik
9	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Aramo	1	Kurang Baik
10	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Hilimegai	1	Kurang Baik
11	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Onolalu	1	Kurang Baik
12	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Lolowau	1	Kurang Baik
13	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. O'o'u	1	Kurang Baik
14	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Hilisalawa'ahe	1	Kurang Baik
15	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Boronadu	1	Kurang Baik
16	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Ulunoyo	1	Kurang Baik
17	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Pulau-Pulau Batu	1	Kurang Baik
18	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Lolomatua	1	Baik
19	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Sidua'ori	1	Baik
20	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Susua	1	Baik
21	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Mazo	1	Baik
22	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Ulu Idanotae	1	Baik
23	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Huruna	1	Baik
24	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Amandraya	1	Baik
25	Bangunan/Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Teluk Dalam	1	Baik
26	Gedung/Gudang Alat Kontrasepsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Baik
Total		26	

Tabel 2.4
Data Alat Angkutan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023

No	Jenis Alat Angkutan	Jumlah	Kondisi
1	Kendaraan Roda 4 (Bus Mini)	1	Rusak Berat
2	Kendaraan Roda 2	20	Baik
Total		21	

Tabel 2.5
Data Alat Kantor dan Rumah Tangga
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023

No	Jenis Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah	Kondisi
1	Meja ½ Biro	20	Baik
2	Meja Biro	13	Baik
3	Meja Kerja Pejabat	10	Baik
4	Lemari Kayu	13	Baik
5	Kursi Putar	11	Baik
6	Kursi Meja	12	Baik
7	AC Split	3	Baik
8	Kursi Plastik	20	Baik
9	Tempat Sampah Plastik	10	Baik
Total		112	

Tabel 2.6
Data Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023

No	Jenis Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Jumlah	Kondisi
1	Proyektor	1	Baik
2	Samsung Galaxy Tab A	17	Baik
Total		18	

Tabel 2.7
Data Komputer dan Perlengkapannya
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2023

No	Jenis Komputer dan Perlengkapannya	Jumlah	Kondisi
1	Personal Komputer	2	Rusak Berat
2	Personal Komputer (Lenovo)	11	Baik
3	Komputer PC	1	Baik
4	Komputer Set (Asus V200 All-In-One PC)	1	Baik
5	Komputer Set (Lenovo)	1	Baik
6	Printer (Epson L120)	1	Rusak Berat
7	Printer (HP Laser Jet Pro M102a)	2	Rusak Berat
8	Printer (Epson L360)	1	Baik
9	Printer (Epson L120)	1	Rusak Ringan
10	Printer (Epson L120)	1	Baik
11	Printer (Epson L5190)	1	Baik
12	Printer (Epson L3110)	1	Baik
Total		24	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan melalui program yang dilaksanakan secara komprehensif, haruslah menjadi komitmen dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, bidang Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, karena isu strategis adalah merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Untuk menentukan isu-isu strategis tersebut, maka perlukan

dilakukan identifikasi permasalahan dan hambatan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya diuraikan untuk masing-masing bidang sebagai pelaksana urusan non pelayanan dasar termasuk juga Sekretariat sebagai unsur *service center* adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

- a. Kualitas pelayanan informasi publik yang belum sesuai dengan standar.
- b. Pemanfaatan SDM di perangkat daerah belum sesuai dengan kompetensi dan potensi yang dimiliki.
- c. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah yang masih kurang.
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

- a. Belum adanya *grand design* kependudukan.
- b. Masih kurangnya kualitas dan jumlah SDM Tenaga Penyuluh KB.
- c. Masih kurangnya informasi dalam parameter pengendalian penduduk.
- d. Pengendalian penduduk belum bisa terpantau dengan jelas karena belum ada analisis data kependudukan yang spesifik dan berkala.

3. Bidang Keluarga Berencana

- a. Masih tingginya *Unmet Need* (Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi).
- b. Masih tingginya jumlah anak yang diinginkan setiap keluarga.
- c. Masih rendahnya pengetahuan PUS tentang metode dan alat kontrasepsi.
- d. Masih tingginya perkawinan usia muda.
- e. Masih rendahnya Kesertaan KB Pria dan peranan pria dalam ber KB.

- f. Masih rendahnya kesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
 - g. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas PPKBD dan Sub PPKBD.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah.
 - b. Masih rendahnya perangkat daerah menyajikan data terpilah terhadap hasil kegiatannya.
 - c. Belum optimalnya perangkat daerah menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
 - d. Masih rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - e. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - f. Pelayanan terhadap korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang belum maksimal.
 - g. Keterbatasan anggaran fasilitas pendampingan dan pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan.
 - h. Belum semua korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaporkan pada PPT.
 - i. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum.
 - j. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan *cyber crime*.
5. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- a. Menurunnya fungsi pengawasan dan perlindungan dalam keluarga.
 - b. Semakin renggangnya pola relasi di dalam keluarga dan masyarakat dari akibat perkembangan teknologi informasi.
 - c. Meningkatnya permasalahan psikososial pada remaja, terlihat dengan meningkatnya kasus kenakalan remaja, pernikahan usia dini, dan kehamilan tidak diinginkan.
 - d. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan *stunting* melalui peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita.
 - e. Masih tingginya prevalensi *stunting*.

Berdasarkan permasalahan dan hambatan di atas, maka didapatkan isu-isu strategis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan meliputi:

1. Penggerakan dan Pelayanan KB.
2. Pencegahan dan penanganan *stunting* melalui peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita.
3. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak
4. Kualitas dan kompetensi SDM perencana bagi Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
5. Pemberdayaan keluarga sejahtera dalam penanganan *stunting*.
6. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

1.3.2 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Dalam hal ini, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan fokus pada Misi I (Kesatu) yaitu *“Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan”* dan Misi II (Kedua) yaitu *“Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif”*.

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja yang menjadi urusan penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan antara lain:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target capaian 70,7 poin.
2. Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan target capaian 23%.
3. Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (II) dengan target capaian 17,65%.
4. Persentase kampung layak anak dengan target capaian 100%.

5. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dengan target capaian 100%.
6. *Unmet Need* KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) dengan target capaian 87%.
7. Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern dengan target capaian 20%.
8. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin dengan target capaian 20%.
9. Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) dengan target capaian 0,7%.
10. Angka prevalensi kontrasepsi modern/*modern Contraceptive* (mCPR) dengan target capaian 20%.
11. Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif dengan target capaian 60%.

Maka untuk mencapai Misi tersebut, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi target capaian indikator kinerja di atas antara lain:

1. Aspek ekonomi dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) melalui sumbangan pendapatan perempuan yang dapat menunjukkan bagaimana perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial yang mengindikasikan adanya kemandirian perempuan secara ekonomi yang dapat berdampak pada relasi yang lebih setara dan kemampuan kontrol yang otonom.
2. Kebijakan partai politik yang bias gender dan pengambilan keputusan yang masih didominasi laki-laki, pendidikan publik yang dilakukan media untuk mendorong representasi perempuan di parlemen masih belum maksimal, faktor lain sumber dana kampanye di dalam keluarga dan relasi gender antara perempuan dengan suaminya mengakibatkan adanya kekhawatiran dapat terjebak pada tindakan tidak bermoral dan melanggar hukum seperti korupsi atau lainnya.
3. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi *mainstream* bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Pengarusutamaan hak anak belum menjadi *mainstream* bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

5. Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak misalnya menderita gangguan perkembangan, retardasi mental, anak yang memiliki perilaku menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri, pola asuh orang tua yang membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan serta faktor media masa/elektronik yang menampilkan adegan kekerasan/perkelahian, acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan. Walaupun pada hakikatnya media massa/elektronik memiliki efek yang positif, namun kadang juga memiliki efek yang negatif.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian *unmet need* adalah usia, pendidikan, pekerjaan, paritas, dan dukungan suami. Usia >35 tahun merasa sudah tua sehingga kemungkinan untuk terjadi kehamilan sangat kecil berdampak pada kejadian *unmet need*. Bagi seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan mempunyai pengetahuan lebih luas dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pekerjaan dapat mempengaruhi kejadian *unmet need*, karena adanya kesibukan dan kurangnya kesempatan dalam mengakses alat kontrasepsi. Paritas/jumlah anak mempengaruhi seseorang dalam menggunakan alat kontrasepsi. Dukungan suami dan perhatian suami berpengaruh pada kejadian *unmet need* dukungan suami yang baik terhadap perilaku ber-KB akan menurunkan kejadian *unmet need*.
7. Faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi metode modern pada Pasangan Usia Subur (PUS) meliputi usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat pengetahuan, dukungan suami dan informasi dari PLKB/PKB.
8. Peningkatan pengetahuan tentang penggunaan metode kontrasepsi tidak hanya bagi wanita tetapi juga bagi pria melalui sarana KIE seperti pemberian brosur yang berisi informasi tentang kontrasepsi yang menarik sehingga mudah dipahami, serta peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan kontrasepsi.
9. Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap angka kelahiran pada perempuan berumur 15-19 tahun adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan jumlah penduduk miskin.
10. Tingkat pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya mengenai

kontrasepsi

modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*).

11. Tingkat pemahaman keluarga tentang pencegahan *stunting* dan pola pengasuhan bayi yang kurang baik.

1.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Program Nasional/Internasional

Dampak terhadap pencapaian Program Nasional salah satunya adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, antara lain:

1. Tanpa Kemiskinan.
2. Tanpa Kelaparan.
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera.
4. Pendidikan Berkualitas.
5. Kesetaraan Gender.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak.
7. Energi Bersih dan Terjangkau.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur.
10. Berkurangnya Kesenjangan.
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.
13. Penanganan Perubahan Iklim.
14. Ekosistem Lautan.
15. Ekosistem Daratan.
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan

mempunyai peranan penting dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama pada tujuan 2 (kedua) yaitu Tanpa Kelaparan, tujuan 3 (ketiga) yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan tujuan 5 (kelima) yaitu Kesenjangan Gender.

Tujuan 1 (pertama) Tanpa Kemiskinan, memiliki beberapa target dan indikator yang menjadi fokus utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. Sedangkan indikatornya, tingkat kemiskinan ekstrem dan Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur serta Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
2. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerja sama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Sedangkan indikatornya, proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.
3. Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan. Sedangkan indikatornya, Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.

Tujuan 2 (kedua) Tanpa Kelaparan, memiliki target yakni pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. Sedangkan indikator yang

menjadi fokus utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan yakni prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.

Tujuan 3 (ketiga) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, memiliki target yakni pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Sedangkan indikator yang menjadi fokus utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan yakni proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern, angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama, *Total Fertility Rate* (TFR).

Tujuan 5 (kelima) Kesenjangan Gender memiliki beberapa target dan indikator yang menjadi fokus utama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Sedangkan indikatornya Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Sedangkan indikatornya antara lain:
 - b. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.
 - c. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.

3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan. Sedangkan indikatornya antara lain:
 - a. Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.
 - b. Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM (*Female Genital Mutilation*), menurut kelompok umur.
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
 - a. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan pemerintah daerah.
 - b. Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial.
5. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut. Sedangkan indikatornya antara lain:
 - a. Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.
 - b. Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
6. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan. Sedangkan indikatornya ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

1.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan (*Threats*)

Adapun tantangan-tantangan (*threats*) yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, antara lain:

- a. Kurangnya pengetahuan Tenaga PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) tentang tugas dan fungsinya.
- b. Belum terpenuhinya ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di setiap Kecamatan.
- c. Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak.
- d. Disparitas Indeks Pembangunan Gender antar Desa/Kelurahan yang menunjukkan angka yang bervariasi, namun antar Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan hal itu belum maksimal digambarkan/dipetakan.
- e. Meningkatnya kasus kekerasan pada Anak dan Perempuan.
- f. Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level.
- g. Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utamaan Gender (PUG).
- h. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
- i. Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja.
- j. Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah.
- k. Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak.
- l. Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB.

- m. Belum optimalnya pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak, dikarenakan masih belum ada regulasi (Peraturan Bupati) yang mengatur tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nias Selatan.
- n. Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dikarenakan masih belum ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

2. Peluang (*Opportunities*)

Adapun peluang (*opportunities*) bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, antara lain:

- a. Adanya Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur pada Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membentuk UPTD PPA yang menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/atau Saksi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana diatur pada Pasal 7. Dengan demikian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sebagai OPD yang membidang Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara teknis memiliki peranan penting dalam proses pembentukan UPTD PPA di Kabupaten Nias Selatan.
- b. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. Maka untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di setiap Kecamatan, OPD terkait dapat untuk

mengusulkan penambahan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana melalui perpindahan dari jabatan lain dengan memprioritaskan PNS Daerah. Sebagaimana diatur pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh KB dapat dilakukan melalui: pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan/atau promosi.

- c. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nias Selatan. Dalam Perda tersebut pada Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ayat (2) menyatakan bahwa Forum Anak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- d. Adanya Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.8_239 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Nias Selatan.
- e. Adanya Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.8_301 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Dengan adanya regulasi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan penurunan prevalensi *stunting* di Kabupaten Nias Selatan.
- f. Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG.

- g. Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial.
- h. Tersedianya organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- i. Tersedianya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja.
- j. Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- k. Kemajuan teknologi informasi.
- l. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mendukung keluarga berencana.
- m. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- n. Tersedianya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- o. Kemudahan informasi tentang KB.
- p. Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Penting yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan Program dan Kegiatan prioritas tahun 2024 yaitu:

1. Penambahan ASN khusus pada Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) untuk memenuhi Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana.

2. Peningkatan kompetensi Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) melalui Pendidikan dan Pelatihan.
3. Penggerakan dan Pelayanan KB.
4. Peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita dalam pencegahan dan penanganan *stunting*.
5. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak
6. Pemberdayaan keluarga sejahtera dalam penanganan *stunting*.
7. Penambahan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.
8. Penurunan angka kemiskinan ekstrem.
9. Pengarusutamaan hak anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dibandingkan dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, maka Renja Tahun 2024 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dan perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Nias Selatan.

Dengan demikian sangat penting untuk menyusun Renja OPD dengan acuan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antara Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan, penjabaran Program dan Kegiatan berdasarkan reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 tertuang pada Tabel T-C.31 berikut :

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025
Provinsi Sumatera Utara

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Nias Selatan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100% Dok	11.176.461.089	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Nias Selatan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	100%	1.574.000.000	-
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 Dok	45.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	10 Dok	52.500.000	-
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	7.500.000	
2 14 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	
2 14 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	
2 14 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	
2 14 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	
2 14 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 Lap	7.500.000	
2 14 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	5 Dok	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	5 Lap	7.500.000	
2 14 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20 Dok	4.612.766.089	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20 Dok	325.000.000	-
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	4.590.266.089	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	300.000.000	
2 14 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Lap	7.500.000	
2 14 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	4 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	4 Lap	10.000.000	
2 14 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 Dok	7.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	1 Dok	7.500.000	
2 14 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	1 Dok	18.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	- Dok	7.500.000	-
2 14 01 2.03 03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	10.000.000						
2 14 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	8.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	7.500.000	
2 14 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	45 Org	75.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	45 Org	120.000.000	-
2 14 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	- Stel	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	30 Paket	75.000.000	
2 14 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nias Selatan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	15 Org	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nias Selatan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	15 Org	45.000.000	
2 14 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	1.152.195.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	365.000.000	-

Kode					Rencana Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Buah	13.310.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	
2	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150 Buah	80.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	20.000.000	
2	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	150 Buah	80.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	332.750.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000	
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	113.135.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Kali	500.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	200.000.000	
2	14	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nias Selatan	Tersedianya dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	33.000.000						
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	14 Unit	2.525.000.000						
2	14	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	- unit							
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	214.500.000	
2	14	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	25.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	25.000.000	
2	14	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	500.000.000	
2	14	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	ada /tidak	148.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	ada /tidak	395.000.000	
2	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Buah	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Lap	5.000.000	
		01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	170.000.000	
		01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	15.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	20.000.000	
		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah tenaga harian lepas untuk pelayanan umum kantor	8 Orang / Bulan	115.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah tenaga harian lepas untuk pelayanan umum kantor	8 Lap	200.000.000	
		01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	40 Unit	2.600.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	40 Unit	309.000.000	
		01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	20.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000	
		01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	30.000.000	
2	14	01	2.09	06						Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 Unit	5.000.000	
		01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25 Unit	2.500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	25 Unit	244.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kab. Nias Selatan				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kab. Nias Selatan				

Kode					Rencana Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kab. Nias Selatan				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kab. Nias Selatan				
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	2 Dokumen 71.70 Kegiatan 80.00 Persen 85.00 Persen	135.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	2 Dokumen 71.70 Kegiatan 80.00 Persen 85.00 Persen	120.000.000	-
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2 Kegiatan 2 Dok 2 Dok	45.000.000	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	2 Kegiatan 2 Dok 2 Dok	50.000.000	
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	1 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	1 Dok	5.000.000	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG)	28 Dokumen	5.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Dokumen	5.000.000	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Keg	15.000.000						-
2	08	02	2.01	05	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	1 Kebijaka	5.000.000	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	1 Kebijakan	10.000.000	
2	08	02	2.01	06	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	25 orang	5.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	25 orang	5.000.000	
2	08	02	2.01	07	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	5.000.000	
2	08	02	2.01	08	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	30 Orang	5.000.000	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	30 Orang	20.000.000	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan			25.000.000	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan			30.000.000	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Kab. Nias Selatan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota								
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Dok	5.000.000	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Dok	20.000.000	
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	20.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	10.000.000	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 08 02 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok	65.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dok	40.000.000	
2 08 02 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	5.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	5.000.000	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang	5.000.000	
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dok	50.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dok	25.000.000	
2 08 02 2.03 04	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	5 Lembaga	5.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	5 Lembaga	5.000.000	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Nias Selatan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	1.67 Kasus per 100.000	50.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Nias Selatan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	1.67 Kasus per 100.000	60.000.000	-
2 08 03 2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan 2 Dokumen	20.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan 2 Dokumen	20.000.000	
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	10.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	10.000.000	
2 08 03 2.01 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	5 PD	10.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	5 PD	10.000.000	
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 10 Orang	10.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 10 Orang	20.000.000	
2 08 03 2.02 01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 Org	5.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 Org	10.000.000	
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	5.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	10.000.000	
2 08 03 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan 1 Dok 10 Orang	20.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan 1 Dok 10 Orang	20.000.000	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 08 03 2.03 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	5.000.000						
2 08 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	5 Orang	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan	5 Orang	15.000.000	
2 08 03 2.03 03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Org	5.000.000	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Org	5.000.000	
2 08 03 2.03 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	5.000.000						
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Nias Selatan	Indeks Pembangunan Keluarga	57,00 Poin	30.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Nias Selatan	Indeks Pembangunan Keluarga	57,00 Poin	65.000.000	-
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14 PD 1 Dok 1 Laporan	15.000.000	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	14 PD 1 Dok 1 Laporan	45.000.000	
2 08 04 201 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 PD	5.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 PD	15.000.000	
2 08 04 201 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	28 Dok	5.000.000	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	28 Dok	15.000.000	
2 08 04 201 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Dok	5.000.000	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Dok	15.000.000	
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga	10.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Lembaga	10.000.000	
2 08 04 2.02 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	5.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	5.000.000	
2 08 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5.000.000	
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Kali	5.000.000	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Kali	10.000.000	
2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan	5.000.000	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan	10.000.000	

Kode	Rencana Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Nias Selatan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	100 Persen	17.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Nias Selatan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	100 Persen	17.000.000	-
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 1 Dokumen Dokumen	17.000.000	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 1 Dokumen Dokumen	17.000.000	
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	7.000.000	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	7.000.000	
2 08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	10.000.000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	10.000.000	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Nias Selatan	Persentase kampung layak anak	100 Persen	30.000.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Nias Selatan	Persentase kampung layak anak	100 Persen	20.000.000	-
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 1 Dokumen	15.000.000	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang 1 Dokumen	15.000.000	
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi	10.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	5 Organisasi	10.000.000	
2 08 06 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	5.000.000	
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 5 Dokumen 5 Orang	15.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Orang	5.000.000	
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Org	5.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Org	5.000.000	
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	5.000.000						
2 08 06 2.02 04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	5.000.000						
2 14 02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Nias Selatan	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	22,00 Persen 86,00 Persen	885.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Nias Selatan	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	22,00 Persen 86,00 Persen	1.200.000.000	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
214022.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Nias Selatan	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Dok 1 Kegiatan 1 Dok 1 Dok 1 Kegiatan	225.000.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Nias Selatan	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Dok 1 Kegiatan 1 Dok 1 Dok 1 Kegiatan	250.000.000	
214022.0101	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dok	5.000.000						
214022.0102	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	1 Dok	50.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat	1 Dok	50.000.000	
214022.0103	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dok	5.000.000						
214022.0107	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dok	30.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dok	30.000.000	
214022.0104	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	1 Dok	5.000.000						
214022.0113	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 Organisasi	50.000.000	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 Organisasi	50.000.000	
214022.0114	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	5.000.000						
214022.0115	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	5.000.000						
214022.0123	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	70.000.000	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	120.000.000	
214022.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dok 1 Dok	660.000.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dok 1 Dok	950.000.000	-
214022.0202	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dok	5.000.000	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dok	5.000.000	
214022.0203	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dok	10.000.000						
214022.0205	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dok	30.000.000	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dok	30.000.000	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 14 02 2.02 06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dok	25.000.000	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dok	25.000.000	
2 14 02 2.02 09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	5.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	5.000.000	
2 14 02 2.02 10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dok	5.000.000	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dok	5.000.000	
2 14 02 2.02 11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dok	5.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dok	5.000.000	
2 14 02 2.02 12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	5.000.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	5.000.000	
2 14 02 2.02 13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	35 Dok	450.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	35 Dok	750.000.000	
2 14 02 2.02 15	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Kab. Nias Selatan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	25 Unit	25.000.000	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Kab. Nias Selatan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	25 Unit	25.000.000	
2 14 02 2.02 16	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 Laporan	20.000.000	
2 14 02 2.02 17	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Parameter pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dok	20.000.000	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Parameter pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dok	20.000.000	
2 14 02 2.02 18	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	1 Laporan	25.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	1 Laporan	25.000.000	
2 14 02 2.02 19	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dok	20.000.000	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dok	20.000.000	
2 14 02 2.02 20	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dok	10.000.000	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dok	10.000.000	
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Nias Selatan	Persentase Kampung KB Aktif Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	100 Persen 100.00 Persen	4.771.837.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Nias Selatan	Persentase Kampung KB Aktif Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	100 Persen 100.00 Persen	3.471.600.000	-
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dok 23 unit 1 Dok	1.821.180.400	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dok 23 unit 1 Dok	1.095.000.000	
2 14 03 201 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dok	5.000.000						
2 14 03 201 03	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	28 Laporan	5.000.000						
2 14 03 2.01 08	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	925.965.400	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	850.000.000	

Kode					Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	14	03	2.01	09	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Unit	230.000.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	28 Unit	20.000.000	
2	14	03	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	28 Laporan	40.000.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	28 Laporan	40.000.000	
2	14	03	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	30.215.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	100.000.000	
2	14	03	2.01	12	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dok	15.000.000	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dok	20.000.000	
2	14	03	2.01	13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dok	50.000.000	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dok	50.000.000	
2	14	03	2.01	14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	15.000.000	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	15.000.000	
2	14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Nias Selatan									
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	78 Kampun g KB	390.000.000						
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	23 Balai Penyuluhan KB	115.000.000						
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	35 Keci 1 Kegiatan 35 Paket	595.406.600	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	35 Keci 1 Kegiatan 35 Paket	161.000.000	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	35 Kecamatan	175.000.000						
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	35 Paket	280.000.000	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	35 Unit	50.000.000	

Kode						Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	14	03	2.02	03		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Kegiatan	30.000.000						
2	14	03	2.02	04		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	461 Orang	40.000.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	461 Orang	40.000.000	
2	14	03	2.02	05		Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	29 Organisasi	50.406.600	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	29 Organisasi	51.000.000	
2	14	03	2.02	06		Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	29 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	29 Laporan	20.000.000	
2	14	03	2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Kegiatan 41 Faskes 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/P 5 KB 5 PLKB/P 41 KB Unit faskes	942.000.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Kegiatan 41 Faskes 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PK 5 B 5 PLKB/PK 41 B Unit faskes	1.610.000.000	
2	14	03	2.03	01		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47 Faskes	50.000.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47 Faskes	20.000.000	
2	14	03	2.03	02		Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 PLKB/P KB	5.000.000						
2	14	03	2.03	03		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	250 Orang	25.000.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	250 Orang	25.000.000	
2	14	03	2.03	04		Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	50.000.000	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	50.000.000	
2	14	03	2.03	05		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	41 Faskes	82.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	50.000.000	
2	14	03	2.03	06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	20.000.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	70.000.000	
2	14	03	2.03	07		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	200 Orang	20.000.000	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	200 Orang	30.000.000	

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2 14 03 2.03 08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	41 Faskes	50.000.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	41 Laporan	35.000.000	
2 14 03 2.03 10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	5 PLKB/PK	30.000.000	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	15 Orang	45.000.000	
2 14 03 2.03 11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Kegiatan	500.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	1.200.000.000	
2 14 03 2.03 13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Nias Selatan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 Org	50.000.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Nias Selatan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 Org	25.000.000	
2 14 03 2.03 14	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kab/kota	20.000.000	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kab/kota	20.000.000	
2 14 03 2.03 15	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Orang	20.000.000	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Orang	20.000.000	
2 14 03 2.03 16	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Nias Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	200 Orang	20.000.000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Nias Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	200 Orang	20.000.000	
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Nias Selatan	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	78 Kampung KB	1.413.250.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Nias Selatan	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	78 Kampung KB	605.600.000	
2 14 03 2.04 01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	25.000.000	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	25.000.000	
2 14 03 2.04 02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	78 Kampung KB	1.328.250.000	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	59 Dokumen	330.600.000	
2 14 03 2.04 04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	35.000.000	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	35.000.000	
2 14 03 2.04 05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Nias Selatan	Jumlah DASHAT di Kampung KB	78 Unit	10.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Nias Selatan	Jumlah DASHAT di Kampung KB	78 Unit	200.000.000	
2 14 03 2.04 06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	78 Kampung KB	15.000.000	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	59 Kampung	15.000.000	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Nias Selatan	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif	70.00 Persen 60.00 Persen 70.00 Persen	7.622.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Nias Selatan	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif	70.00 Persen 60.00 Persen 70.00 Persen	4.872.427.000	-

Kode	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
214042.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	78 K. KB 20 Paket 461 Desa 1 Dok	6.238.800.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	78 K. KB 20 Paket 461 Desa 1 Dok	1.895.427.000	
2140420101	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	78 Kampung KB	1.155.000.000						
2140420102	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Paket	100.000.000						
2140420105	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	461 Desa	2.212.800.000						
2140420108	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	321.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	321.000.000	
2140420114	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Nias Selatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200 Keluarga	200.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Nias Selatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200 Keluarga	200.000.000	
2140420115	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Kab. Nias Selatan	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	15.000.000	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Kab. Nias Selatan	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	15.000.000	
2140420116	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Lap/Dok	50.000.000	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Lap/Dok	50.000.000	
2140420117	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 Laporan	100.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	100.000.000	

Kode						Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	14	04	201	18		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	100 Unit	100.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	50 Unit	300.000.000	
2	14	04	201	19		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	100 Orang	100.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	100 Orang	100.000.000	
2	14	04	201	20		Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100 Orang	100.000.000	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100 Orang	100.000.000	
2	14	04	201	21		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	25.000.000	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan	25.000.000	
2	14	04	201	22		Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100 Orang	40.000.000	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100 Orang	40.000.000	
2	14	04	201	24		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 Orang	50.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100 Orang	50.000.000	
2	14	04	2.01	25		Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	20.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	20.000.000	
2	14	04	2.01	26		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	100 Kelompok	300.000.000	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	100 Kelompok	300.000.000	
2	14	04	201	27		Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dok	50.000.000	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dok	50.000.000	
2	14	04	201	28		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	78 Kelompok	1.300.000.000	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	59 Kelompok	224.427.000	
2	14	04	2.02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Dok	1.384.000.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Dok	2.977.000.000	
2	14	04	2.02			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja								

Kode					Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
					Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Organisasi	30.000.000	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Organisasi	30.000.000	
2	14	04	202	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	20.000.000	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	20.000.000	
2	14	04	202	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Organisasi	30.000.000	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Organisasi	30.000.000	
2	14	04	202	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	50.000.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	50.000.000	
2	14	04	202	05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Nias Selatan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	50.000.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Nias Selatan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	1.336.000.000	
2	14	04	202	06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	1.204.000.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	1.491.000.000	
JUMLAH ANGGARAN									24.718.098.089						
														11.400.027.000	

KEPALA DINAS P2KBP3A
KABUPATEN NIAS SELATAN

SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina Tk. I
NIP. 19810810 200112 2 001

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil desk Forum Perangkat Daerah dan usulan Musrenbang Kecamatan serta usulan Pokir DPRD, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan belum mendapatkan usulan program dan kegiatan yang berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan. Akan tetapi walaupun belum terakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan akan selalu berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja sesuai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2024.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 disajikan ke dalam Tabel T-C.32 berikut.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kab. Nias Selatan			
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Kab. Nias Selatan			
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	120.000.000	-
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	50.000.000	
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	5.000.000	
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	10.000.000	
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	5.000.000	
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	5.000.000	
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	20.000.000	

2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan		30.000.000	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5.000.000	
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5.000.000	
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	25.000.000	
2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	5.000.000	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kab. Nias Selatan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	60.000.000	-
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	10.000.000	

2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	10.000.000	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	15.000.000	
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	5.000.000	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kab. Nias Selatan	Indeks Pembangunan Keluarga	65.000.000	-
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000	
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	15.000.000	
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	

2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5.000.000	
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	10.000.000	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kab. Nias Selatan	Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	17.000.000	-
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.000.000	
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	7.000.000	
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kab. Nias Selatan	Persentase kampung layak anak	20.000.000	-
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan	15.000.000	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10.000.000	
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	

2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kab. Nias Selatan			
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGANDALIAN PENDUDUK	Kab. Nias Selatan			
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Nias Selatan	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	2.413.500.000	-
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	52.500.000	-
2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	
2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	7.500.000	
2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	7.500.000	
2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	7.500.000	
2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	7.500.000	
2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	7.500.000	
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	7.500.000	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	325.000.000	-
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	300.000.000	
2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	7.500.000	
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	10.000.000	
2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognostik realisasi anggaran yang tersusun	7.500.000	

2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	7.500.000	-
--------------	--	-------------------	---	-----------	---

2.14.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.500.000	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000	-
2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	75.000.000	
2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Nias Selatan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	45.000.000	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	365.000.000	-
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	
2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	20.000.000	
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20.000.000	
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65.000.000	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.000.000	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah pengadaan barang milik daerah	839.500.000	-
2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	214.500.000	
2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kab. Nias Selatan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25.000.000	
2.14.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	500.000.000	
2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100.000.000	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	395.000.000	-
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	170.000.000	
2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.000.000	
2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nias Selatan	Jumlah tenaga harian lepas untuk pelayanan umum kantor	200.000.000	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Nias Selatan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	309.000.000	-
2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30.000.000	

2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30.000.000	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5.000.000	
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	244.000.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kab. Nias Selatan	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1.200.000.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kab. Nias Selatan	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	250.000.000	
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	30.000.000	
2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50.000.000	
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	120.000.000	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	950.000.000	-
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	5.000.000	
2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	30.000.000	
2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	25.000.000	

2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	5.000.000	
-------------------	--	-------------------	---	-----------	--

2.14.02.2.02.0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	5.000.000	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5.000.000	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	5.000.000	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	750.000.000	
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	Kab. Nias Selatan	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	25.000.000	
2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Kab. Nias Selatan	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	20.000.000	
2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	20.000.000	
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	25.000.000	
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Nias Selatan	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	20.000.000	
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	10.000.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kab. Nias Selatan	Persentase Kampung KB Aktif Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	3.471.600.000	-
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1.095.000.000	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	850.000.000	
2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20.000.000	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	40.000.000	

2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	100.000.000	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20.000.000	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Nias Selatan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	50.000.000	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15.000.000	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	161.000.000	
2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	50.000.000	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	40.000.000	
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	51.000.000	
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	20.000.000	

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.610.000.000	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	20.000.000	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25.000.000	
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	50.000.000	
2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	50.000.000	
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	70.000.000	
2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	30.000.000	
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	35.000.000	
2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Nias Selatan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	45.000.000	
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1.200.000.000	
2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Nias Selatan	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	25.000.000	
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	20.000.000	

2.14.03.2.03.0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	20.000.000	
2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Nias Selatan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	20.000.000	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Nias Selatan	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	605.600.000	
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	25.000.000	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	330.600.000	
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	35.000.000	
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Nias Selatan	Jumlah DASHAT di Kampung KB	200.000.000	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	15.000.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kab. Nias Selatan	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif	4.872.427.000	-
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	1.895.427.000	

2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	321.000.000	
2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Nias Selatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200.000.000	
2.14.04.2.01.0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Kab. Nias Selatan	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	15.000.000	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	50.000.000	
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	100.000.000	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Nias Selatan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	300.000.000	
2.14.04.2.01.0019	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	100.000.000	
2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100.000.000	
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	25.000.000	
2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	40.000.000	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	50.000.000	
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	20.000.000	

2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	300.000.000	
2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50.000.000	
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	224.427.000	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nias Selatan	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2.977.000.000	
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.000.000	
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.000.000	
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30.000.000	
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	50.000.000	

2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Nias Selatan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.356.000.000	
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Nias Selatan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1.491.000.000	
				12.239.527.000	-

KEPALA DINAS P2KBP3A
KABUPATEN NIAS SELATAN

SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina Tk. I
NIP. 19810810 200112 2 001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1.1.1 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2019-2024 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2019.

a) Visi Kementerian PPPA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kementerian PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kementerian PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kementerian PPPA tahun 2020-2024 yaitu: "Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

b) Misi Kementerian PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kementerian PPPA Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kementerian PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO.
2. Peningkatan perlindungan anak.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kementerian PPPA didasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kementerian PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan tujuan Kementerian PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.

6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kementerian PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak” dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “Perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA).
5. Persentase ARG pada belanja langsung APBD.

Penyusunan tujuan Renstra Kementerian PPPA juga memperhatikan 5 arahan Presiden, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak.
3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Penurunan pekerja anak.
5. Pencegahan perkawinan anak.

Gambar 3.1
Skema Perumusan Tujuan Kementerian PPPA



Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
4	Indeks PUG Nasional
5	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
6	Proporsi Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun
7	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peringkat menuju KLA
8	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
9	Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
10	Indeks Kualitas Keluarga
11	Prevalensi Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan
12	Persentase pemula yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar
13	Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
14	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan Komprehensif
15	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
16	Indeks Reformasi Birokrasi
17	Opini BPK atas Laporan Keuangan
18	Tingkat Maturitas SPIP
19	Nilai SAKIP

c) Sasaran Strategis Kementerian PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif.

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kementerian PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis

yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi.
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan.
- c. Tingkat Maturitas SPIP.
- d. Nilai SAKIP.

1.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Agenda Pembangunan Nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV Tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran Pembangunan Jangka

Menengah Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup antara lain: Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada Prioritas Nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing”, dan Prioritas Nasional “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing:
 - a. Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan Kegiatan Prioritas (KP) ada 2 (dua) yakni Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
 - b. Program Prioritas (PP) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan Kegiatan Prioritas yakni Kesejahteraan Sosial.
 - c. Program Prioritas (PP) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan Kegiatan Prioritas yakni:
 - 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.
 - 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap Kegiatan Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

- 1) Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi.
- 2) Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah.
- 3) Peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif gender.
- 4) Peningkatan kompetensi PKB/PLKB.
- 5) Penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi.
- 6) Penguatan Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.

2. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkokuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan Kegiatan Prioritas Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari Kegiatan Prioritas tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:

- a. Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
- b. Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
- c. Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
- d. Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia Periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
 - a. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - b. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
 - c. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
 - d. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
 - e. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 - f. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
 - g. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
2. Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
 - a. Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - b. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - c. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - d. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
 - a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.

- b. Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
 - c. Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - d. Peningkatan KB Pria.
 - e. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - f. Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
4. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- a. Peningkatan penyebaran materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - b. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
5. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- a. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
 - b. Pengembangan *Smart Technology*/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

1.1.3 Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan *stunting* melalui rencana aksi nasional dengan pendekatan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2045.

Adapun yang melatarbelakangi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yakni agenda pembangunan sumber daya manusia berkualitas merupakan pilar bagi pencapaian Visi Indonesia 2045 yaitu manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Sehingga penting kiranya mengatasi berbagai persoalan terkait dengan penyiapan sumber daya manusia berkualitas untuk mencapai Visi Indonesia

2045 serta mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di tengah masyarakat internasional.

Dalam kerangka pembangunan kualitas sumber daya manusia, permasalahan *Stunting* yang merupakan salah satu bagian dari *double burden malnutrition* (DBM) mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktivitas ekonomi dan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, *Stunting* terkait dengan perkembangan sel otak yang akhirnya akan menyebabkan tingkat kecerdasan menjadi tidak optimal. Hal ini berarti bahwa kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang akan lebih rendah dan akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah ditetapkan 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, dan untuk memperkuat pelaksanaannya mengamanatkan disusunnya rencana aksi nasional, mekanisme tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tujuan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, antara lain:

1. Melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan *Stunting* tingkat pusat, daerah, desa dan bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan.
2. Melakukan penguatan dan pepaduan sistem manajemen data dan informasi percepatan penurunan *Stunting*.
3. Melakukan penguatan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*.
4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan *Stunting*.
5. Mengintegrasikan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan *Stunting*.

6. Melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*.

Tujuan yang ingin dicapai dalam percepatan penurunan *Stunting* adalah mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia sebagaimana terdapat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Sasaran, Indikator dan Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	80
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	58
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	80
	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	80
	f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	90
	g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90
	i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90
Tersedianya	a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	70

layanan Intervensi Spesifik.	b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	15,5
	c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (persen).	90
	d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	100
	e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	90
	f. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (juta).	112,9
	g. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan (persen).	90
	h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (juta).	10,0
	i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	70
	j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan (juta).	15,6
	k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	90

Target dan sasaran percepatan penurunan *Stunting* dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana tercantum dalam Lampiran B Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dengan sasaran dan target sebagai berikut:

1. **Pilar 1** : Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa
 - a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan *Stunting*.
 - 1) Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 2) Terselenggaranya koordinasi di kabupaten/kota;
 - 3) Terselenggaranya rembuk *Stunting* tingkat kecamatan;
 - 4) Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting*;

- 5) Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan;
 - 6) Jumlah desa/kelurahan bebas *Stunting*;
 - 7) Persentase pemerintah daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - 8) Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- b. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa.
- 1) Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2) Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi;
 - 3) Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. **Pilar 2** : Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat
- a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator:
- 1) Terlaksananya kampanye nasional pencegahan *Stunting*;
 - 2) Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
 - 3) Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 4) Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*
- 1) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 2) Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan

Stunting sebagai hasil Pendidikan dan pelatihan di kabupaten/kota;

- 3) Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
- 4) Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;
- 5) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
- 6) Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;
- 7) Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.

c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*.

- 1) Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *Stunting* lintas agama;
- 2) Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *Stunting*.

3. **Pilar 3** : Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa

a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.

- 1) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);

- 2) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
- 3) Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa);
- 4) Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan *Stunting*;
- 5) Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 6) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- 7) Persentase calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
- 8) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi;
- 9) Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
- 10) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- 11) Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
- 12) Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
- 13) Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
- 14) Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*; dan
- 15) Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan *Stunting*.

- a. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
 - 1) Cakupan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - 2) Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
 - 3) Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
 - 4) Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - 5) Persentase kabupaten/kota dengan *Age Specific Fertility Rate*/ASFR (15-19) paling sedikit 18 per 1.000;
 - 6) Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan;
 - 7) Persentase *unmet need* pelayanan keluarga berencana.
4. **Pilar 4** : Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
 - a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.
 - 1) Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
 - 2) Persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 - 3) Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI);
 - 4) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 - 5) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai;
 - 6) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;

- b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan
 - 1) Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.
- 5. **Pilar 5** : Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi
 - a. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *Stunting*.
 - 1) Persentase pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2) Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3) Publikasi data *Stunting* tingkat kabupaten/kota;
 - 4) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
 - 5) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah daerah provinsi;
 - 6) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 7) Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah desa;
 - 8) Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) *Stunting*.
 - b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.
 - 1) Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi;
 - 2) Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3) Tersedianya data keluarga risiko *Stunting* yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
 - 4) Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah;

- 5) Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *Stunting*.
- c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
 - 1) Persentase kabupaten/kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
- d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.
 - 1) Tersusunnya platform berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2) Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3) Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi;
 - 4) Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan *Stunting*.

Kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* setidaknya menggunakan tiga pendekatan, dimana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan *Stunting* secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko *Stunting*.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1.1.4 Tujuan Renja Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan melalui berbagai kegiatan tahunan.. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Misi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu **Misi ke-1: “Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan”** dan **Misi ke-3: “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif”**.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan Kedua Misi di atas antara lain:

1. Terwujudnya birokrasi dan tata kelola Pemerintah yang lebih baik.
2. Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing.

1.1.5 Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran Renja Perangkat Daerah adalah penjabaran tujuan secara terukur yaitu suatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai sebagai instrumen untuk mencapai tujuan, antara lain:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintah
2. Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound/Timely*). Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih cepat, tepat, jelas dan tegas serta akuntabilitas pada publik. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*achievable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound/Timely*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Meningkatnya kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan yang berkualitas dan kredibel.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
3. Penggerakan dan Pelayanan KB.
4. Melaksanakan Pencegahan dan penanganan *stunting* melalui Peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita.
5. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan kerja merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 82 (delapan puluh dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG.

- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
- b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 3) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- 2) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD..
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
 - 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan..
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Pengadaan Mebel.
 - 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Program Pengendalian Penduduk
- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK).
 - 2) Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan.
 - 3) Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan.
 - 4) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan.
 - 5) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga.
 - 6) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.
 - b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan.
 - 2) Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
 - 3) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
 - 4) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.
8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - 2) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK.
 - 3) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.
 - 4) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).
 - 5) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
 - 6) Pengendalian Program KKBPK.
- b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - 2) Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - 3) Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - 4) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - 5) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - 6) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
 - 7) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak.
 - 8) Peningkatan Kesertaan KB Pria.
- c. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 1) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.

9. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
 - 2) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - 3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - 4) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK.
- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja.

Rumusan rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 diuraikan ke dalam Tabel T-C.33 berikut.

TABEL T-C. 33
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KABUPATEN NIAS SELATAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS P2KBP3A 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan					Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
															Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2					3					4	5	6	7	8	9	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kab. Nias Selatan														
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Kab. Nias Selatan														
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Kab. Nias Selatan	2 Dokumen Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	120.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		72.70Persen 2Dokumen 85.00Persen 2Kegiatan 80.00Persen	131.000.000								
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan	2 Kegiatan 2 Dok 2 Dok	50.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN		-	55.000.000								
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)	Kab. Nias Selatan	1 Dok	5.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			6.000.000								
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	28 Dokumen	5.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			6.000.000								
2	08	02	2.01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	Kab. Nias Selatan	1 Kebijakan	10.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG			10.000.000								
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Kab. Nias Selatan	25 orang	5.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			6.000.000								
2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	5.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			6.000.000								
2	08	02	2.01	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Kab. Nias Selatan	30 Orang	20.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			21.000.000								

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan					Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
															Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2					3					4	5	6	7	8	9	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Nias Selatan		30.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN					32.000.000			
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	28 Dok	20.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				21.000.000			
2	08	02	2.02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	5 Organisasi	10.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				11.000.000			
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	2 Dok	40.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			-	44.000.000			
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Kab. Nias Selatan	5 Lembaga	5.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				6.000.000			
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Nias Selatan	5 Orang	5.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				6.000.000			
2	08	02	2.03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Nias Selatan	2 Dok	25.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				26.000.000			
2	08	02	2.03	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	Kab. Nias Selatan	5 Lembaga	5.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				6.000.000			
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	Kab. Nias Selatan	1.67 Kasus per 100.000	60.000.000				1.67 Kasus per 100.000	66.000.000			
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Kegiatan 2 Dokumen	20.000.000				-	22.000.000			
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dok	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				11.000.000			
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Kab. Nias Selatan	5 PD	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				11.000.000			

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan		Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4	5	6	7	8	9	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	10 Orang 10 Orang	20.000.000				-	22.000.000	
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kab. Nias Selatan	5 Org	10.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				11.000.000	
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	10 Layanan	10.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				11.000.000	
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	2 Laporan 1 Dok 10 Orang	20.000.000				-	22.000.000	
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Kab. Nias Selatan	5 Orang	15.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				16.000.000	
2	08	03	2.03	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Kab. Nias Selatan	10 Org	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM				6.000.000	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan	57.00 Poin	65.000.000				57.00 Poin	71.000.000	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	14 PD 1 Dok 1 Laporan	45.000.000				-	48.000.000	
2	08	04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	5 PD	15.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN				16.000.000	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan					Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
															Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2					3					4	5	6	7	8	9	
2	08	04	2.01	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia					Kab. Nias Selatan	28 Dok	15.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			16.000.000
2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Nias Selatan	28 Dok	15.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			16.000.000
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Nias Selatan	1 Lembaga	10.000.000			-	12.000.000
2	08	04	2.02	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan					Kab. Nias Selatan	5 Lembaga	5.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			6.000.000
2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Nias Selatan	10 Orang	5.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			6.000.000
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Nias Selatan	5 Kali	10.000.000			-	11.000.000
2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia					Kab. Nias Selatan	5 Layanan	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			11.000.000
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAANSISTEM DATA GENDER DAN ANAK					Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)					Kab. Nias Selatan	100 Persen	17.000.000			100.00Persen	19.000.000
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Nias Selatan	1 Dokumen 1 Dokumen	17.000.000			-	19.000.000
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia					Kab. Nias Selatan	1 Dok	7.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			8.000.000
2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Nias Selatan	1 Dok	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			11.000.000
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					Persentase kampung layak anak					Kab. Nias Selatan	100 Persen	20.000.000			100.00Persen	21.400.000
2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Nias Selatan	10 Orang 1 Dokumen	15.000.000			-	16.200.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2 08 06 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Nias Selatan	5 Organisasi	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			11.000.000
2 08 06 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dok	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			5.200.000
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen 1 Dokumen 5 Orang	5.000.000			-	5.200.000
2 08 06 2.02 0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	5 Org	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			5.200.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		Kab. Nias Selatan						
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGANDALIAN PENDUDUK		Kab. Nias Selatan						13.696.200.000,00
2 14 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Kab. Nias Selatan	100%	2.413.500.000			100Persen BNilai/ Predikat	2.821.200.000
2 14 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	Kab. Nias Selatan	10 Dok	52.500.000			-	53.900.000
2 14 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	1 Dok	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.700.000
2 14 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.700.000
2 14 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.700.000
2 14 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.700.000
2 14 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.700.000
2 14 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Lap	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.700.000
2 14 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kinerja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Kab. Nias Selatan	5 Lap	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			7.700.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	
214012.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan	20 Dok	325.000.000		-	327.400.000
214012.02	0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Kab. Nias Selatan	14 Bulan	300.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB KB		301.000.000
214012.02	0005					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Lap	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.200.000
214012.02	0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang tersusun	Kab. Nias Selatan	4 Lap	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10.500.000
214012.02	0008					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang tersusun	Kab. Nias Selatan	1 Dok	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7.700.000
214012.03						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dikelola Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	1 Dok	7.500.000		-	8.200.000
214012.03	0005					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nias Selatan	1 Lap	7.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8.200.000
214012.05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mendapatkan manfaat administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	45 Org	120.000.000		-	122.000.000
214012.05	0002					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	Kab. Nias Selatan	30 Paket	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB KB		76.000.000
214012.05	0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Nias Selatan	15 Org	45.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB KB		46.000.000
214012.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya layanan pendukung administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Nias Selatan	100 %	365.000.000		-	372.000.000
214012.06	0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	10 Paket	10.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12.000.000
214012.06	0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Kab. Nias Selatan	5 Paket	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		21.000.000
214012.06	0003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	5 Paket	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		21.000.000
214012.06	0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	1 Paket	65.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-		66.000.000
214012.06	0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	1 Paket	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-		51.000.000
214012.06	0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan	150 Laporan	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		201.000.000
214012.07						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Kab. Nias Selatan	14 Unit	839.500.000		-	1.130.000.000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
								Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5		6	7	8	9	
2	14	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	10	Unit	214.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-			500.000.000	
2	14	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	4	Unit	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			28.000.000	
2	14	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	4	Unit	500.000.000	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR			501.000.000	
2	14	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	10	Unit	100.000.000	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR			101.000.000	
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Nias Selatan	ada	Ada	395.000.000			-	398.200.000	
2	14	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan	350	Lap	5.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			5.200.000	
2	14	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	12	Lap	170.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-			171.000.000	
2	14	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Nias Selatan	12	Lap	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			21.000.000	
2	14	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga harian lepas untuk pelayanan umum kantor	Kab. Nias Selatan	8	Lap	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-			201.000.000	
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Nias Selatan	40	Unit	309.000.000			-	409.500.000	
2	14	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Nias Selatan	1	Unit	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			31.000.000	
2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Nias Selatan	25	Unit	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			31.000.000	
2	14	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Nias Selatan	12	Unit	5.000.000	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING			17.500.000	
2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Nias Selatan	25	Unit	244.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN INTERVENSI STUNTING			330.000.000	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Kab. Nias Selatan	22.00 Persen	86.00 Persen	1.200.000.000			85.00Persen	24.00Persen	1.313.000.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan	1 Dok 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Dok 1 Dok 1 Kegiatan	250.000.000			-	292.000.000
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dok	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			60.000.000
2	14	02	2.01	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan	1 Dok	30.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			31.000.000
2	14	02	2.01	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan	10 Organisasi	50.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			51.000.000
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Nias Selatan	1 Kegiatan	120.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			150.000.000
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan	1 Dok 1 Dok	950.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			1.021.000.000
2	14	02	2.02	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Nias Selatan	1 Dok	5.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			5.200.000
2	14	02	2.02	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Nias Selatan	1 Dok	30.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			35.000.000
2	14	02	2.02	0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Nias Selatan	1 Dok	25.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			30.000.000
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	5.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			5.200.000
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Kab. Nias Selatan	1 Dok	5.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			5.200.000
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Kab. Nias Selatan	1 Dok	5.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			5.200.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	5.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			5.200.000
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	35 Dok	750.000.000				800.000.000
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Kab. Nias Selatan	25 Unit	25.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			30.000.000
2	14	02	2.02	0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			21.000.000
2	14	02	2.02	0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Kab. Nias Selatan	1 Dok	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			21.000.000
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	25.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			26.000.000
2	14	02	2.02	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Kab. Nias Selatan	1 Dok	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			21.000.000
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan	1 Dok	10.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			11.000.000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kampung KB Aktif Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	100 Persen 100.0 Persen 0	3.471.600.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB		100Persen 100.00Persen	4.769.000.000
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan	1 Dok 23 unit 1 Dok	1.095.000.000			-	1.374.000.000
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	850.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			950.000.000,00
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Nias Selatan	28 Unit	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			21000000
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Nias Selatan	28 Laporan	40.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			42000000

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	100.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			200000000	
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta MediaLuar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan	1 Dok	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			41000000	
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Kab. Nias Selatan	1 Dok	50.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			100000000	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	1 Organisasi	15.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			20000000	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	35 Kec 1 Kegiatan 35 Paket	161.000.000			-	182.000.000	
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Kab. Nias Selatan	35 Unit	50.000.000	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR			51.000.000	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Nias Selatan	461 Orang	40.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			50.000.000	
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan	29 Organisasi	51.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			60.000.000	
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kab. Nias Selatan	29 Laporan	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			21.000.000	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	4 Kegiatan 41 Faskews 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PK 5 B 5 PLKB/PK 41 B Unit faskes	1.610.000.000			-	1.631.000.000
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	47 Faskes	20.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			25.000.000
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Nias Selatan	250 Orang	25.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			26.000.000
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	50.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			51.000.000
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	1 Dokumen	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			51.000.000
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	5 Unit	70.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			25.000.000
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Nias Selatan	200 Orang	30.000.000	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			31.000.000
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Nias Selatan	41 Laporan	35.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			36.000.000
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Nias Selatan	15 Orang	45.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			47.000.000
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Nias Selatan	4 Laporan	1.200.000.000	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB			1.250.000.000
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Kab. Nias Selatan	10 Org	25.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			26.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	
2 14 03 2.03 0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan					Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kab. Nias Selatan	1 Kab/kota	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			21.000.000
2 14 03 2.03 0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB					Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan	15 Orang	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			21.000.000
2 14 03 2.03 0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan					Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kab. Nias Selatan	200 Orang	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			21.000.000
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan	78 Kampung KB	605.600.000			-	1.582.000.000
2 14 03 2.04 0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Nias Selatan	5 Organisasi	25.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			26.000.000
2 14 03 2.04 0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan	59 Dokumen	330.600.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			1.250.000.000
2 14 03 2.04 0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	35.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN			36.000.000
2 14 03 2.04 0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas					Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kab. Nias Selatan	78 Unit	200.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			250.000.000
2 14 03 2.04 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kab. Nias Selatan	59 Kampung	15.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			20.000.000
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif	Kab. Nias Selatan	70.00 Persen 60.00 Persen 70.00 Persen	4.872.427.000			-	3.749.000.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan	78 K. KB 20 Paket 461 Desa 1 Dok	1.895.427.000			-	2.046.000.000
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	321.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			400.000.000
2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Nias Selatan	200 Keluarga	200.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			230.000.000
2	14	04	2.01	0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kab. Nias Selatan	1 Kegiatan	15.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			25.000.000
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Kab. Nias Selatan	1 Lap/Dok	50.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			51.000.000
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	100.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			110.000.000
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kab. Nias Selatan	50 Unit	300.000.000	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAK NON FISIK-BOKB-KB			350.000.000
2	14	04	2.01	0019	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kab. Nias Selatan	100 Orang	100.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			110.000.000
2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	100 Orang	100.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			110.000.000

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan		Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3		4	5	6	7	8	9	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	25.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB				26.000.000	
2	14	04	2.01	0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	100 Orang	40.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB				41.000.000	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	100 Orang	50.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB				51.000.000	
2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB				21.000.000	
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kab. Nias Selatan	100 Kelompok	300.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB				350.000.000	
2	14	04	2.01	0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kab. Nias Selatan	1 Dok	50.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB				51.000.000	
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kab. Nias Selatan	59 Kelompok	224.427.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB				120.000.000	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	1 Dok	2.977.000.000			-		1.703.000.000	
2	14	04	2.02	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	5 Organisasi	30.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB				31.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Rancangan Renja Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2 14 04 2.02 0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	20.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			21.000.000
2 14 04 2.02 0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Nias Selatan	5 Organisasi	30.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			31.000.000
2 14 04 2.02 0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	50.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			60.000.000
2 14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	1.356.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			60.000.000
2 14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Kab. Nias Selatan	1 Laporan	1.491.000.000	DAK NON FISIK-BOKB-KB			1.500.000.000
					12.239.527.000				12.960.600.000

KEPALA DINAS P2KBP3A
KABUPATEN NIAS SELATAN

SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina Tk. II
NIP. 19810810 200112 2 001

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, secara rinci tercantum pada Tabel 4.1 (terlampir).

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebanyak 9 program 28 kegiatan dengan nilai total pagu anggaran sebesar Rp. 15.653.366.000 dengan diprioritaskan kepada pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kualitas/kompetensi Sumber Daya Manusia, peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak, peningkatan kualitas pelayanan KB serta percepatan penurunan stunting.

Agar pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 memenuhi harapan sebagaimana imbalan antara rancangan awal dan analisis kebutuhan, perlu disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

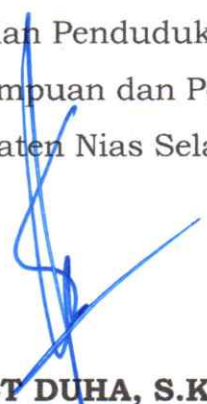
1. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 diturunkan dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sebagai manifestasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.
2. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 menjadi bahan bagi stakeholder bidang perencanaan pembangunan untuk dapat dikritisi, dievaluasi dan disempurnakan dalam Forum DKT (Diskusi Kelompok Terbatas) antara Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan dengan stakeholder bidang perencanaan pembangunan.
3. Skala prioritas terhadap rasionalisasi anggaran ataupun program/kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025, dan selalu dikembalikan pada upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan

pusat ataupun pemerintahan provinsi, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sekaligus mencapai Visi Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan dalam kurun waktu 2021-2026 "***Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera***".

Teluk Dalam, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Nias Selatan,



SWASTI ELISABET DUHA, S.Kep., Ns., M.K.M

Pembina Tk. I

NIP. 19810810 200112 2 001

LAMPIRAN

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kab. Nias Selatan Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur			Target		
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												14.006.300.000,00	
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												14.006.300.000,00	
2	08	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												310.100.000,00	
2	08	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/kota												132.700.000,00	
2	08	2.0	50.000.000,00												56.700.000,00
2	08	2.0	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	1 Dokumen 2 kegiatan 2 Dok 2 Dokumen	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6.000.000,00
2	08	2.0	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	28 Dokumen 2 kegiatan 2 Dok 2 Dokumen	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Dokumen	6.000.000,00
2	08	2.0	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	1 Kebijakan 2 kegiatan 2 Dok 2 Dokumen	10.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota	1 Kebijakan	11.500.000,00
2	08	2.0	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	25 Orang 2 kegiatan 2 Dok 2 Dokumen	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	25 Orang	6.000.000,00
2	08	2.0	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	1 Laporan 2 kegiatan 2 Dok 2 Dokumen	5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan	6.200.000,00
2	08	2.0	0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	30 Orang 2 kegiatan 2 Dok 2 Dokumen	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	30 Orang	21.000.000,00
2	08	2.0	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota											32.000.000,00	
2	08	2.0	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi											32.000.000,00

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	28 Dokumen		20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Dokumen	21.000.000,00	
2	08	0	2.0	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	5 Organisasi		10.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Organisasi	11.000.000,00
2	08	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							40.000.000,00				44.000.000,00	
2	08	0	2.0	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	5 Lembaga 2 Dok		5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	6.000.000,00
2	08	0	2.0	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	5 Orang 2 Dok		5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang	6.000.000,00
2	08	0	2.0	0003	Pengembangan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	2 Dokumen 2 Dok		25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	26.000.000,00
2	08	0	2.0	0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	Pengembangan komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen 2 Kegiatan 71.70 Persen 80.00 Persen 85.00 Persen	5 Lembaga 2 Dok		5.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi	5 Lembaga	6.000.000,00
2	08	0	3		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							60.000.000,00				66.000.000,00	
2	08	0	2.0		Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							20.000.000,00				22.000.000,00	
2	08	0	2.0	0001	koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.67 kasus per 100.000	1 Dokumen 1 Kegiatan 2 Dokumen		10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.000.000,00	
2	08	0	2.0	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota												

					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,67 kasus per 100.000	5 Perangkat Daerah	1 Kegiatan 2 Dokumen	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	11.000.000,00	
2	08	0	2.0		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							20.000.000,00				22.000.000,00	
2	08	0	2.0	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,67 kasus per 100.000	5 Orang	10 Orang 10 Orang		10.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	5 Orang	11.000.000,00
2	08	0	2.0	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,67 kasus per 100.000	10 Layanan	10 Orang 10 Orang		10.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	11.000.000,00
2	08	0	2.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							20.000.000,00				22.000.000,00	
2	08	0	2.0	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,67 kasus per 100.000	5 Orang	2 Laporan 1 Dokumen 10 Orang		15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	5 Orang	16.000.000,00
2	08	0	2.0	0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,67 kasus per 100.000	10 Orang	2 Laporan 1 Dokumen 10 Orang		5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	10 Orang	6.000.000,00
2	08	0	2.0		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							65.000.000,00				71.000.000,00	
2	08	0	2.0		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota							45.000.000,00				48.000.000,00	
2	08	0	2.0	0001	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota												
					Indeks Pembangunan Keluarga	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57,00 Poin	5 Perangkat Daerah	14 PD 1 Dokumen 1 Laporan		15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Perangkat Daerah	16.000.000,00
2	08	0	2.0	0002	Pelaksanaan komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Indeks Pembangunan Keluarga	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57,00 Poin	28 Dokumen	14 PD 1 Dokumen 1 Laporan		15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	28 Dokumen	16.000.000,00
2	08	0	2.0	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota												
					Indeks Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57,00 Poin	28 Dokumen	14 PD 1 Dokumen 1 Laporan		15.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Dokumen	16.000.000,00

Rencana Kerja | Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2025 143

					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Dokumen	1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	7.700.000,00
2	14	0	2.0	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Dokumen	1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.700.000,00
2	14	0	2.0	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Dokumen	1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.700.000,00
2	14	0	2.0	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Dokumen	1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7.700.000,00
2	14	0	2.0	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Dokumen	1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	7.700.000,00
2	14	0	2.0	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Laporan	1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.700.000,00
2	14	0	2.0	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	5 Laporan	1 Dok 1 Dok 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dok 1 Dok	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	7.700.000,00
2	14	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							325.000.000,00				327.400.000,00
2	14	0	2.0	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Lakip OPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulnias/Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	14 Orang/bulan	1 Dok 4 Dok 14 Bulan 1 Dok	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	301.000.000,00
2	14	0	2.0	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Laporan	1 Dok 4 Dok 14 Bulan 1 Dok	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.200.000,00
2	14	0	2.0	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	4 Laporan	1 Dok 4 Dok 14 Bulan 1 Dok	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	10.500.000,00
2	14	0	2.0	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Dokumen	1 Dok 4 Dok 14 Bulan 1 Dok	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	7.700.000,00
2	14	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							7.500.000,00					8.200.000,00
2	14	0	2.0	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Laporan	1 Dokumen	7.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	8.200.000,00
2	14	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							120.000.000,00					122.000.000,00
2	14	0	2.0	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	30 Paket	16 Orang 45 Stel	75.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-BOK		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	76.000.000,00
2	14	0	2.0	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas Bersama Atribut Kelengkapannya	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	15 Orang	16 Orang 45 Stel	45.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKB-BOK		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	46.000.000,00
2	14	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah							365.000.000,00					372.000.000,00
2	14	0	2.0	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	10 Paket	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Buah 150 Buah 150 Buah 150 Kali	10.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.000.000,00
2	14	0	2.0	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	5 Paket	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Buah 150 Buah 150 Buah 150 Kali	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	21.000.000,00
2	14	0	2.0	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	5 Paket	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Buah 150 Buah 150 Buah 150 Kali	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	21.000.000,00
2	14	0	2.0	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												

					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Paket	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Buah 150 Buah 150 Buah 150 Kali	65.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	66.000.000,00
2	14	0	2.0	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Paket	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Buah 150 Buah 150 Buah 150 Kali	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1 Paket	51.000.000,00
2	14	0	2.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	150 Laporan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Buah 150 Buah 150 Buah 150 Kali	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	201.000.000,00
2	14	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							839.500.000,00				1.130.000.000,00
2	14	0	2.0	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	10 Unit	4 Unit 14 unit 1 Unit 10 Unit	214.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan Intervensi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	500.000.000,00
2	14	0	2.0	0005	Pengadaan Mebel											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	4 Unit	4 Unit 14 unit 1 Unit 10 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	28.000.000,00
2	14	0	2.0	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	4 Unit	4 Unit 14 unit 1 Unit 10 Unit	500.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	501.000.000,00
2	14	0	2.0	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	10 Unit	4 Unit 14 unit 1 Unit 10 Unit	100.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	101.000.000,00
2	14	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							395.000.000,00				398.200.000,00
2	14	0	2.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
					Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	350 Laporan	12 bulan 8 Orang 12 Bulan 350 Buah	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350 Laporan	5.200.000,00
2	14	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											

				Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	12 Laporan	12 bulan 8 Orang 12 Bulan 350 Buah	170.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	171.000.000,00
2	14	0	2.0	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
				Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	12 Laporan	12 bulan 8 Orang 12 Bulan 350 Buah	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	21.000.000,00
2	14	0	2.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
				Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	8 Laporan	12 bulan 8 Orang 12 Bulan 350 Buah	200.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	201.000.000,00
2	14	0	2.0	Pemeliharaan barang Milik Daerah Pemegang Urusan Pemerintahan Daerah											
2	14	0	2.0	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
				Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	1 Unit	25 Unit 1 Unit 25 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	31.000.000,00
2	14	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
				Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	25 Unit	25 Unit 1 Unit 25 Unit	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	275.000.000,00
2	14	0	2.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
				Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	12 Unit	25 Unit 1 Unit 25 Unit	5.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan Intervensi Stunting	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	17.500.000,00
2	14	0	2.0	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
				Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan Nilai Laki OPD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 8 Nilai/ Predikat	25 Unit	25 Unit 1 Unit 25 Unit	244.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan Intervensi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	330.000.000,00
2	14	2		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											
2	14	0	2.0	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk											
2	14	0	2.0	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota										
				Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KBPK Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KBPK) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Dokumen	1 Dok 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dok 1 Kegiatan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000,00
2	14	0	2.0	0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Usai Lokal Kabupaten/Kota										

					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KB/PK Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KB/PK) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Dokumen	1 Dok 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dok 1 Kegiatan	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.000.000,00
2	14	0	2	0	0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan											
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KB/PK Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KB/PK) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	10 Organisasi	1 Dok 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dok 1 Kegiatan	50.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	10 Organisasi	51.000.000,00
2	14	0	2	0	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana											
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KB/PK Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KB/PK) Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Berserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Kegiatan	1 Dok 1 Kegiatan 1 Dokumen 1 Dok 1 Kegiatan	120.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	50.000.000,00
2	14	0	2	0		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/kota											
												950.000.000,00					1.021.000.000,00
2	14	0	2	0	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan											
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	5.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen	5.200.000,00
2	14	0	2	0	0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan											
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	30.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	35.000.000,00
2	14	0	2	0	0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan											
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	25.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	30.000.000,00
2	14	0	2	0	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga											
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Laporan	1 Dokumen 1 Dokumen	5.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	5.200.000,00
2	14	0	2	0	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga											

					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dinfaatkan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dinfaatkan	1 Dokumen	5.200.000,00
2	14	0	2.0	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga													
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	5.200.000,00
2	14	0	2.0	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	5.200.000,00
2	14	0	2.0	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	35 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	750.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	35 Dokumen	800.000.000,00
2	14	0	2.0	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB		Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain											
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	25 Unit	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	25 Unit	30.000.000,00
2	14	0	2.0	0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota													
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 Laporan	21.000.000,00
2	14	0	2.0	0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB													
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	1 Dokumen	21.000.000,00
2	14	0	2.0	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana													
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	1 Laporan	26.000.000,00
2	14	0	2.0	0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana)													
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana)	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana)	1 Dokumen	21.000.000,00
2	14	0	2.0	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangsa Kencana)													
					Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.00 Persen 86.00 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	11.000.000,00
2	14	0			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)								3.471.600.000,00					5.669.000.000,00
2	14	0	2.0		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal								1.095.000.000,00					2.274.000.000,00
2	14	0	2.0	0008	Pengendalian Program KBPK													
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KBPK	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBPK Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	1 Laporan	1 Dok 23 unit 1 Dok	1 Dok	850.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KBPK	1 Laporan	950.000.000,00
2	14	0	2.0	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana													
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBPK Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	28 Unit	1 Dok 23 unit 1 Dok	1 Dok	20.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	28 Unit	21.000.000,00

2	14	0	2.0	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBPK Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	28 Laporan	1 Dok 23 unit 1 Dok	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	28 Laporan	42.000.000,00
2	14	0	2.0	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBPK Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	1 Laporan	1 Dok 23 unit 1 Dok	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	200.000.000,00
2	14	0	2.0	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBPK Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	1 Dokumen	1 Dok 23 unit 1 Dok	20.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	41.000.000,00
2	14	0	2.0	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBPK Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	1 Dokumen	1 Dok 23 unit 1 Dok	50.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1.000.000.000,00
2	14	0	2.0	0014	Advokasi Program Bangsa Kencana oleh poka advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KBPK Promosi dan KIE Program KBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	1 Organisasi	1 Dok 23 unit 1 Dok	15.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	20.000.000,00
2	14	0	2.0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								161.000.000,00				182.000.000,00	
2	14	0	2.0	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	35 Unit	35 Kecamatan 1 Kegiatan 35 Paket	50.000.000,00	DAK Fisik-Bidang kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan kesehatan Dasar		Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	35 Unit	51.000.000,00
2	14	0	2.0	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	461 Orang	35 Kecamatan 1 Kegiatan 35 Paket	40.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	461 Orang	50.000.000,00
2	14	0	2.0	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	29 Organisasi	35 Kecamatan 1 Kegiatan 35 Paket	51.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	29 Organisasi	60.000.000,00
2	14	0	2.0	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													

					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	29 Laporan	35 Kecamatan 1 Kegiatan 35 Paket	20.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	29 Laporan	21.000.000,00
2	14	0	2.0		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Labuhan/Lota							1.610.000.000,00				1.631.000.000,00
2	14	0	2.0	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	47 Laporan	4 Kegiatan 41 Faskews 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	20.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	47 Laporan	25.000.000,00
2	14	0	2.0	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)											
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	250 Orang	4 Kegiatan 41 Faskews 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	25.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	250 Orang	26.000.000,00
2	14	0	2.0	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP											
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	1 Laporan	4 Kegiatan 41 Faskews 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	50.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	51.000.000,00
2	14	0	2.0	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB											

					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	1 Dokumen	4 Kegiatan 41 Faskesw 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dokumen	51.000.000,00
2	14	0	2.0	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	5 Unit	4 Kegiatan 41 Faskesw 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	70.000.000,00	DAK NonFisk-BOKB-KB, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	25.000.000,00
2	14	0	2.0	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	200 Orang	4 Kegiatan 41 Faskesw 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	30.000.000,00	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	200 Orang	31.000.000,00
2	14	0	2.0	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	41 Laporan	4 Kegiatan 41 Faskesw 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	35.000.000,00	DAK NonFisk-BOKB-KB, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	41 Laporan	36.000.000,00
2	14	0	2.0	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi											

					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	15 Orang	4 Kegiatan 41 Faskes 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	45.000.000,00	DAK Non-Fisk-BOKB-KB, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	15 Orang	47.000.000,00
2	14	0	2.0	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak											
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	4 Laporan	4 Kegiatan 41 Faskes 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	1.200.000.000,00	DAK Non-Fisk-BOKB-BOKB	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4 Laporan	1.250.000.000,00
2	14	0	2.0	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria											
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	10 Orang	4 Kegiatan 41 Faskes 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	25.000.000,00	DAK Non-Fisk-BOKB-KB	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	10 Orang	26.000.000,00
2	14	0	2.0	0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan											
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Persentase Kampung KB Aktif	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	1 Kab/kota	4 Kegiatan 41 Faskes 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	20.000.000,00	DAK Non-Fisk-BOKB-KB	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	1 Kab/kota	21.000.000,00
2	14	0	2.0	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB											

					Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Percentase Kampung KB Aktif	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokos) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	15 Orang	4 Kegiatan 41 Faskes 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	20.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	15 Orang	21.000.000,00
2	14	0	2.0	0016	Promosi dan konseling KB Pasca Persalinan											
					Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Percentase Kampung KB Aktif	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan KB Pria Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokos) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	200 Orang	4 Kegiatan 41 Faskes 47 Faskes 10 Org 15 PLKB/PKB 5 PLKB/PKB 5 Unit 41 faskes	20.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	200 Orang	21.000.000,00
2	14	0	2.0		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							605.600.000,00				1.582.000.000,00
2	14	0	2.0	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB											
					Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Percentase Kampung KB Aktif	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	5 Organisasi	78 Kampung KB	25.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	5 Organisasi	26.000.000,00
2	14	0	2.0	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB											
					Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Percentase Kampung KB Aktif	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	59 Dokumen	78 Kampung KB	330.600.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	59 Dokumen	1.250.000.000,00
2	14	0	2.0	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB											
					Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Percentase Kampung KB Aktif	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	1 Laporan	78 Kampung KB	35.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1 Laporan	36.000.000,00
2	14	0	2.0	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas											
					Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Percentase Kampung KB Aktif	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	78 Unit	78 Kampung KB	200.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah DASHAT di Kampung KB	78 Unit	250.000.000,00
2	14	0	2.0	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas											
					Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB Percentase Kampung KB Aktif	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.00 Persen 100 Persen	59 Kampung	78 Kampung KB	15.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	59 Kampung	20.000.000,00
2	14	0	2.0		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							4.872.427.000,00				3.749.000.000,00
2	14	0	2.0		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							1.895.427.000,00				2.046.000.000,00
2	14	0	2.0	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)											

						-	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	321.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	400.000.000,00
2	14	0	2.0	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	200 keluarga	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	200.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200 keluarga	230.000.000,00
2	14	0	2.0	0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	-	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Kegiatan	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	15.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	1 Kegiatan	25.000.000,00
2	14	0	2.0	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	Jumlah laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan / Dokumen	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	50.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	1 Laporan / Dokumen	51.000.000,00
2	14	0	2.0	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	-											

						-	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	110.000.000,00
2	14	0	2.0	0018			Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
			4	1		-	Jumlah Unit Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Unit	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	300.000.000,00	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Unit Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	50 Unit	350.000.000,00
2	14	0	2.0	0019			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										
					-	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100 Orang	110.000.000,00	
2	14	0	2.0	0020			Advokasi dan Promosi iBangga (Index Pembangunan Keluarga)										
					-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Index Pembangunan Keluarga)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 Orang	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	100.000.000,00	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Index Pembangunan Keluarga)	100 Orang	110.000.000,00	
2	14	0	2.0	0021			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)										

Rencana Kerja | Dinas P2KBP3A Kab. Nias Selatan Tahun 2025 157

						-	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	100 kelompok	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	300.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	100 kelompok	350.000.000,00
2	14	0	2.0	0027			Penyediaan dan Pengembangan Materi IBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)										
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi IBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	50.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi IBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	51.000.000,00
2	14	0	2.0	0028			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)										
						-	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	59 kelompok	78 Kampung KB 20 Paket 461 Desa 1 Dokumen	224.427.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	59 kelompok	120.000.000,00
2	14	0	2.0	4	2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						2.977.000.000,00				1.703.000.000,00
2	14	0	2.0	4	2	0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
						-	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Organisasi	1 Kegiatan	30.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Organisasi	31.000.000,00
2	14	0	2.0	4	2	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
						-	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	1 Kegiatan	20.000.000,00	DAK Non Fisik- BOKB-KB	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	21.000.000,00
2	14	0	2.0	4	2	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										

						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BCH, BIZ, BIL, PPPKS, PKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPEK)	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Organisasi	1 Kegiatan	30.000.000,00	DAK Non Palk-BOED-43	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BCH, BIZ, BIL, PPPKS, PKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPEK)	5 Organisasi	31.000.000,00
2	14	0	2.0	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	1 Kegiatan	50.000.000,00	DAK Non Palk-BOED-43	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	60.000.000,00
2	14	0	2.0	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	1 Kegiatan	1.356.000.000,00	DAK Non Palk-BOED-43	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	60.000.000,00
2	14	0	2.0	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Nias Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan	1 Kegiatan	1.491.000.000,00	DAK Non Palk-BOED-43	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	1.500.000.000,00
TOTAL												12.239.927.000,00				14.006.900.000,00

KEPALA DINAS P2KBP3A
KABUPATEN NIAS SELATAN

SWASTI ELISA S. RUTHA, S.Kep., Ns., M.K.M
Pembina Teknis
NIP. 19810810 200112 2 001